



**LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
TAHUN 2021**

**DINAS PENANGGULANGAN
KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
PROVINSI DKI JAKARTA**

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Salam Sejahtera Bagi Kita Semua

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahNya sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Dinas Gulkarmat) Provinsi DKI Jakarta dapat diselesaikan tepat pada waktunya.



Penyusunan LKIP Dinas Gulkarmat merupakan amanah dari Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri PAN RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pelunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tatat Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LKIP merupakan wujud pertanggungjawaban Dinas Gulkarmat atas pencapaian sasaran strategis sebagaimana yang telah dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2021. Laporan ini merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas Dinas Gulkarmat dalam melaksanakan kewajiban pelayanannya.

Sangat disadari bahwa laporan ini masih belum sempurna dalam menyajikan prinsip transparansi dan akuntabilitas seperti yang diharapkan, namun diharapkan masyarakat dan berbagai pihak yang berkepentingan dapat memperoleh gambaran mengenai hasil pelayanan yang telah dilakukan oleh Dinas Gulkarmat.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Jakarta, 20 Januari 2022
Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran
dan Penyelamatan



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1. Memberikan informasi mengenai perencanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi kinerja Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021.....	1
2. Sebagai bahan evaluasi terhadap kinerja Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021.	1
3. Hasil evaluasi akan dijadikan acuan perbaikan dan peningkatan kinerja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di tahun selanjutnya serta masa yang akan datang.	1
1.2 Struktur Organisasi	1
1.3 Fungsi dan Tugas	4
1.4 Sumber Daya Manusia.....	5
1.5 Sarana dan Prasarana	7
1.6 Aset Bangunan.....	9
1.7 Keuangan	11
1.8 Sistematika Penulisan	13
BAB II PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA.....	14
2.1 Perencanaan Strategis	14
2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2021	17
2.3 Rencana Anggaran Tahun 2021	20
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	22
3.1 Capaian Kinerja Tahun 2021	22
3.2 Realisasi Anggaran Tahun 2021	45
3.3 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Tahun 2021	47
BAB IV PENUTUP	50
4.1 Kesimpulan	50
4.2 Saran	50
4.3 Tindak Lanjut.....	51

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Data Kendaraan Dinas Operasional	7
Tabel 1. 2 Jumlah dan Status aset Pos dan Sektor	9
Tabel 1. 3 Anggaran dan Realisasi Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan.....	12
Tabel 2. 1 Target Sasaran Strategis pada Dokumen RENSTRA Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Tahun 2017-2022	16
Tabel 2. 2 Target Sasaran Strategis pada Draft Dokumen Perubahan RENSTRA Dinas Penanggulangan Kebaran dan Penyelamatan Tahun 2017-2022	17
Tabel 2. 3 Formulir Penetapan Kinerja Tahun 2021	18
Tabel 2. 4 Alokasi Anggaran per Sasaran Strategis Tahun 2021	20
Tabel 3. 1 Interpretasi Capaian Kinerja Sasaran	23
Tabel 3. 2 Capaian Perjanjian Kinerja Tahun 2021	24
Tabel 3. 3 Target dan Realisasi Tingkat Kesiapsiagaan Pelayanan Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan.....	28
Tabel 3. 4 Perhitungan Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran	34
Tabel 3. 5 Realisasi KSD 39 Tahun 2021 Disgulkarmat.....	35
Tabel 3. 6 Realisasi KSD 61 Tahun 2021 Disgulkarmat.....	37
Tabel 3. 7 Realisasi KSD 63 Tahun 2021 Disgulkarmat.....	37
Tabel 3. 8 Capaian Kinerja Tahun 2018-2021	44
Tabel 3. 9 Perbandingan Pencapaian Indikator Kinerja dengan Realisasi Anggaran tahun 2021	46
Tabel 3.10 Perbandingan Anggaran pada APBD TA 2021 dengan APBD-P TA 2021	47
Tabel 3.11 Efisiensi Realisasi Anggaran Terhadap Pencapaian IKU	48
Tabel 3.12 Analisis Penggunaan Sumber Daya	49

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Struktur Organisasi Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan	3
Gambar 1. 2 Tugas dan fungsi Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan	4
Gambar 1. 3 Proporsi SDM Dinas Disgulkarmat.....	5
Gambar 1. 4 ASN Disgulkarmat Berdasarkan Usia	6
Gambar 1. 5 Jumlah Pegawai Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan berdasarkan Pendidikan	7
Gambar 1. 6 Rasio Kantor Sektor terhadap Jumlah Kecamatan.....	10
Gambar 1. 7 Rasio Pos terhadap Jumlah Kelurahan	10
Gambar 2. 1 Keterkaitan antara Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran pada RPJMD 2017-2022 dan Rancangan Perubahan RPJMD Tahun 2017-2022	15
Gambar 3. 1 Grafik Trend Ketercapaian Layanan Response time kebakaran (15 menit) Tahun 2018-2021	27
Gambar 3. 2 Grafik Frekuensi Kebakaran DKI Jakarta Tahun 2017-2021	27
Gambar 3. 3 Sosialisasi melalui pengeras suara rumah ibadah ibadah.....	33
Gambar 3. 4 Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Disgulkarmat Tahun 2021 Triwulan 1-4	43

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021 merupakan gambaran kinerja dari seluruh unit kerja di Dinas Gulkarmat termasuk evaluasi dan analisis terhadap kinerja pencapaian sasaran dan kegiatan yang telah ditetapkan berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2021 antara Gubernur Provinsi DKI Jakarta dengan Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran Provinsi DKI Jakarta. Laporan ini disusun juga sebagai bentuk pertanggungjawaban atas keberhasilan atau kegagalan dalam menjalankan fungsi dan urusan ketenteraman dan ketertiban serta perlindungan masyarakat sesuai dengan lingkup tugasnya.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021 memiliki dua fungsi yaitu (1) sebagai laporan pertanggung jawaban kepada publik atas pelaksanaan tugas dan fungsi yang telah dijalankan dan (2) sebagai informasi kinerja yang dihasilkan dapat digunakan oleh publik untuk memberikan saran/masukan guna memicu perbaikan kinerja Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta.

Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan sebagai salah satu Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mendukung seluruh visi misi Gubernur DKI Jakarta Periode 2018-2022 yang sesuai dengan lingkup tugasnya.

“Jakarta Kota Maju, Lestari dan Berbudaya yang Warganya terlibat dalam Mewujudkan Keberadaan, Keadilan dan Kesejahteraan bagi Semua”

Misi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang didukung oleh Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan adalah

Misi Pertama

Menjadikan Jakarta kota yang aman, sehat, cerdas, berbudaya, dengan memperkuat nilai-nilai keluarga dan memberikan ruangkeaktifitas melalui kepemimpinan yang melibatkan, menggerakkan dan memanusiaikan.

Dalam mencapai Visi dan Misi tersebut ditetapkanlah tujuan Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan yaitu **Mewujudkan kota aman dari bahaya kebakaran dan bencana lainnya**, dengan sasaran yang akan dicapai yaitu **Terwujudnya peningkatan kesiapsiagaan pelayanan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan**. Dengan ditetapkannya tujuan dan sasaran perangkat daerah maka akan lebih jelas Langkah-langkah yang harus dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut sehingga dapat mendukung tercapainya visi dan misi Gubernur.

Mengacu kepada Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 05 Tahun 2021 tentang tentang Pelaporan Kinerja Pemerintah Daerah. LKIP menyajikan ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana yang

diperjanjikan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Tahun 2021.

Keberhasilan capaian sasaran strategis diukur dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang menggambarkan peran Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta untuk mencapai tugas fungsinya. Pengukuran capaian kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021 terdapat 8 (delapan) sasaran strategis, 7 (tujuh) sasaran khusus, dan 4 (empat) sasaran operasional. Pengukuran kemudian dilanjutkan dengan analisis yang menunjang ketercapaian kinerja tersebut berikut keterkaitan antara satu indikator kinerja dengan indikator kinerja lainnya. Perjanjian Kinerja dari sasaran strategis yang merupakan tujuan dan sasaran perangkat daerah diambil dari Draft Perubahan Resntra 2017-2022 yang secara keabsahannya belum memiliki dasar hukum dikarenakan RPJMD Perubahan 2017-2022 juga belum disahkan. Secara umum capaian sasaran strategis tersebut telah menunjukkan tingkat capaian yang Sangat Tinggi dengan capaian rata-rata sasaran strategis mencapai 102,54% sebagaimana tabel berikut

Capaian Indikator Sasaran Kinerja Tahun 2021

NO	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
Sasaran Strategis					
1	Rata-rata jumlah jiwa terdampak tiap kejadian kebakaran	jiwa/kejadian	7,3	5,62	123%
2	Tingkat kesiapsiagaan pelayanan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan	skor	5,80	5,97	103%
3	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran	persen	91	99,40	109%
4	Persentase penyelesaian rencana aksi Reform Perizinan untuk Percepatan Ease of Doing Business (EoDB) (17)	persen	100	100	100%
5	Persentase penyelesaian rencana aksi Mewujudkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dengan Predikat AA (39)	persen	100	100	100%
	Persentase penyelesaian rencana aksi Peningkatan Kualitas Kinerja Pemerintahan (61)	persen	100	100	100%
6	Persentase penyelesaian rencana aksi Implementasi SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) (63)	persen	100	100	100%
7	Persentase penyelesaian rencana aksi Pengelolaan pengurangan risiko bencana daerah (67)	persen	100	100	100%

NO	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
8	Persentase penyelesaian rencana aksi Mitigasi dan Adaptasi Bencana Iklim (72)	persen	100	100	100%
Sasaran Khusus					
9	Persentase layanan pemadaman dalam waktu tanggap (response time) 15 menit	Persentase	97	99,93	103%
10	Persentase bangunan gedung diperiksa dan mendapatkan rekomendasi teknis	Persentase	100	100	100%
11	Persentase Pemanfaatan E-Order	Persentase	100	100	100%
12	Opini laporan keuangan daerah	WTP	3	3	100%
13	Persentase implementasi rencana strategi komunikasi publik program-program umum dan unggulan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.	Persentase	100	100	100%
14	Predikat SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	A (81)	93,48	115%
15	Nilai PMP RB Perangkat Daerah	Persen	92	88,73	96%
Sasaran Operasional					
16	Persentase capaian penyelesaian Tindak Lanjut Arahan Gubernur	Persentase	100	100	100%
17	Persentase capaian penyelesaian pengaduan masyarakat	Persentase	100	99,07	99,07%
18	Survei Kepuasan Masyarakat	Indeks	86	87	101%
19	Persentase progress penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	Persentase	100	100	100%

Ditengah pandemi covid-19 anggaran dilakukan refocusing dalam rangka penanganan covid-19, hal tersebut menyebabkan anggaran Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta mengalami pengurangan sebesar 9% untuk menyelesaikan target indikator kinerja utama di tahun 2021. Dengan sisa anggaran tersebut, Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan mampu mencapai rata-rata target indikator kinerja sebesar 102,54%. Oleh karena itu seluruh sisa anggaran pada tahun 2021 dapat dikatakan sebagai efisiensi.

Secara keseluruhan tugas fungsi Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta dapat dilaksanakan dengan baik dengan beberapa prestasi diantaranya, mempertahankan penurunan frekuensi kebakaran dengan jumlah frekuensi kebakaran di Tahun 2021 sebanyak 1535 kejadian. Selain itu dalam menghadapi berbagai kendala pelaksanaan kegiatan yang dibatasi oleh anggaran dan juga dilarangnya proses berkumpul dengan masyarakat, maka muncullah inovasi-inovasi pelaksanaan kegiatan yang berkolaborasi dengan

masyarakat pada proses sosialisasi pencegahan dan penanggulangan kebakaran yang dilakukan melalui pengeras suara tempat ibadah dan hal tersebut berjalan pada 45.876 titik di seluruh DKI Jakarta.

Penyusunan rencana kinerja Tahun 2020 masih belum sesuai dan selaras dengan Renstra Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Tahun 2017-2022 sehingga diperlukan penyesuaian Renstra dengan sasaran yang diharapkan dan mengikuti kaidah perencanaan kinerja yang ada.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan salah satu wujud pertanggung jawaban Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan dalam meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan penganggaran berbasis kinerja. Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Publik dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LKIP Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan ini adalah untuk memberikan gambaran capaian kinerja penyelenggaraan pemerintah secara jelas, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan capaian keberhasilan dan kegagalan capaian target sasaran kurun waktu Tahun Anggaran 2021 dan sebagai bentuk akuntabilitas kinerja yang dicerminkan dari hasil pencapaian kinerja berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Tujuan disusunnya LKIP adalah untuk

1. Memberikan informasi mengenai perencanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi kinerja Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021;
2. Sebagai bahan evaluasi terhadap kinerja Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021.
3. Hasil evaluasi akan dijadikan acuan perbaikan dan peningkatan kinerja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di tahun selanjutnya serta masa yang akan datang.

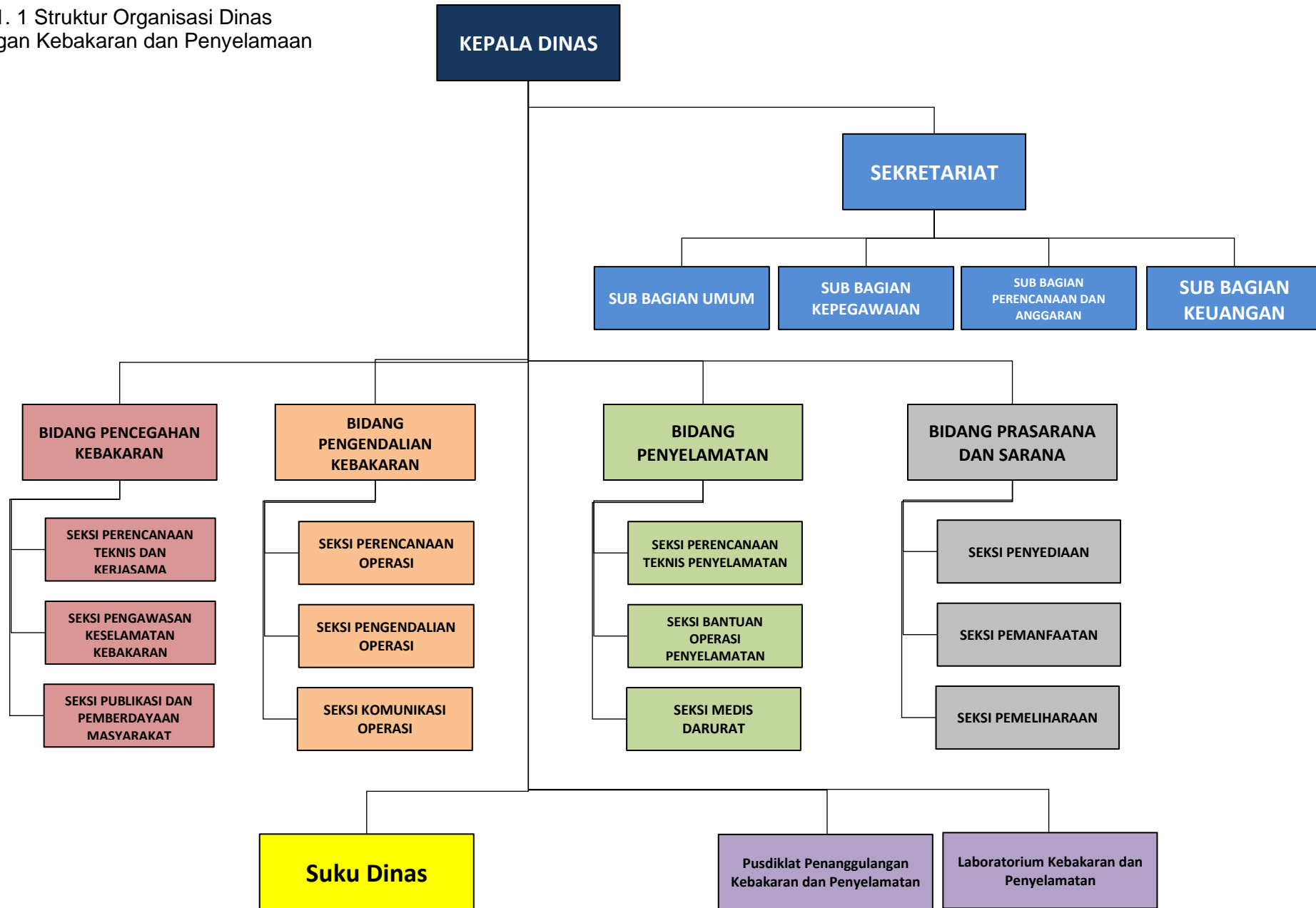
1.2 Struktur Organisasi

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Struktur Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan terdiri atas Kepala Dinas dan dibantu oleh—:

1. Sekretariat Dinas
2. Bidang Pencegahan Kebakaran
3. Bidang Pengendalian Kebakaran
4. Bidang Penyelamatan
5. Bidang Prasana dan Sarana

6. Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kota Administrasi Jakarta Pusat
7. Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kota Administrasi Jakarta Utara
8. Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kota Administrasi Jakarta Barat
9. Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kota Administrasi Jakarta Selatan
10. Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kota Administrasi Jakarta Timur
11. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan
12. Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kebakaran dan Penyelamatan

Gambar 1. 1 Struktur Organisasi Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamaan



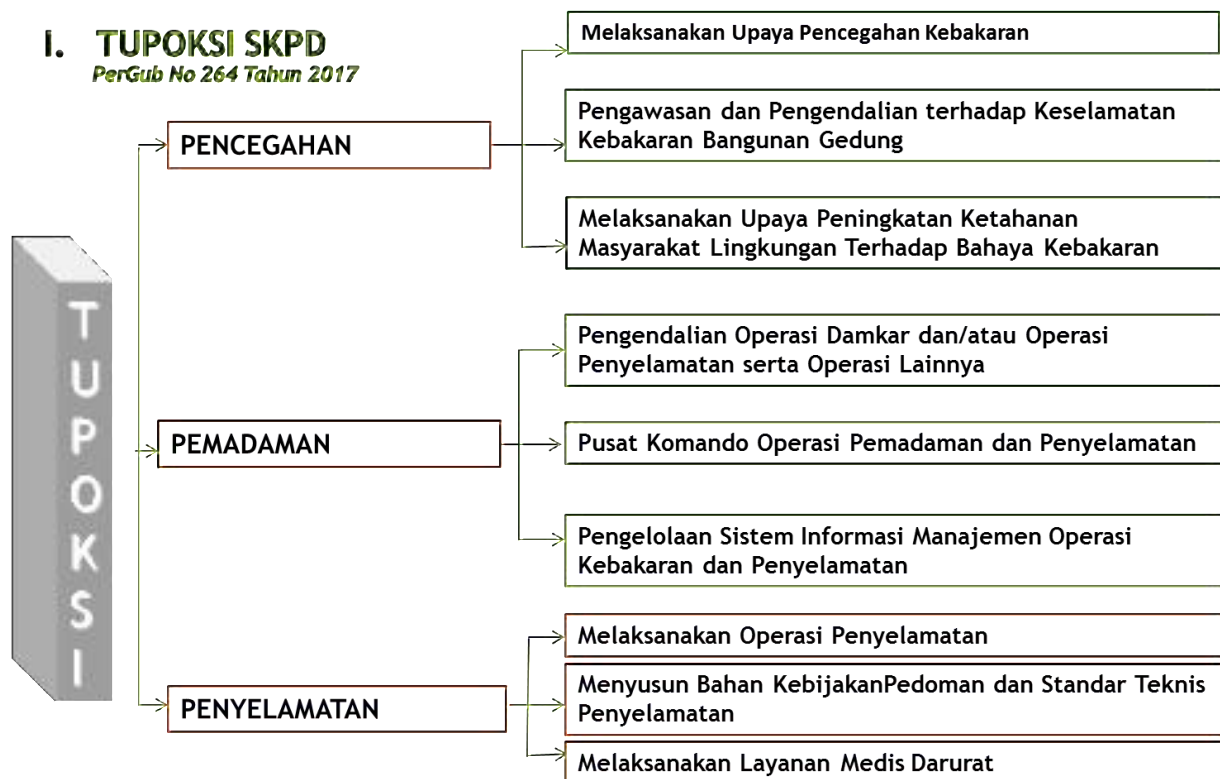
1.3 Fungsi dan Tugas

Tata Kerja Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Nomor 264 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan.

Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan merupakan unsur pelaksana yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Daerah bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub bidang kebakaran.

Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan mempunyai tugas melaksanakan pencegahan dan penanggulangan kebakaran serta penyelamatan. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan menyelenggarakan fungsi sebagaimana termuat dalam Gambar 1.2.

Gambar 1. 2 Tugas dan fungsi Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan



1.4 Sumber Daya Manusia

Dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya, Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan membutuhkan SDM yang memadai, baik dari segi kualitas dan kuantitas. Saat ini (per 1 Januari 2022) SDM Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan terdiri dari 2.459 Aparatur Sipil Negara (ASN) dan 2.022 PJLP (Penedia Jasa Lepas Perorangan) seperti Gambar 1.3. PJLP merupakan tenaga kontrak yang direkrut oleh Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan sebagai solusi untuk menutup kekurangan jumlah personil damkar dikarenakan masih berlakunya moratorium (penghentian sementara) penerimaan PNS. Jumlah PJLP Pada Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan cukup besar yaitu 42% dan perlu mendapatkan perhatian dikarenakan tidak adanya ikatan khusus yang menjamin bahwa PJLP tersebut akan tetap bekerja Di Disgulkarmat dalam jangka panjang sementara skill PJLP terus ditingkatkan melalui diklat.

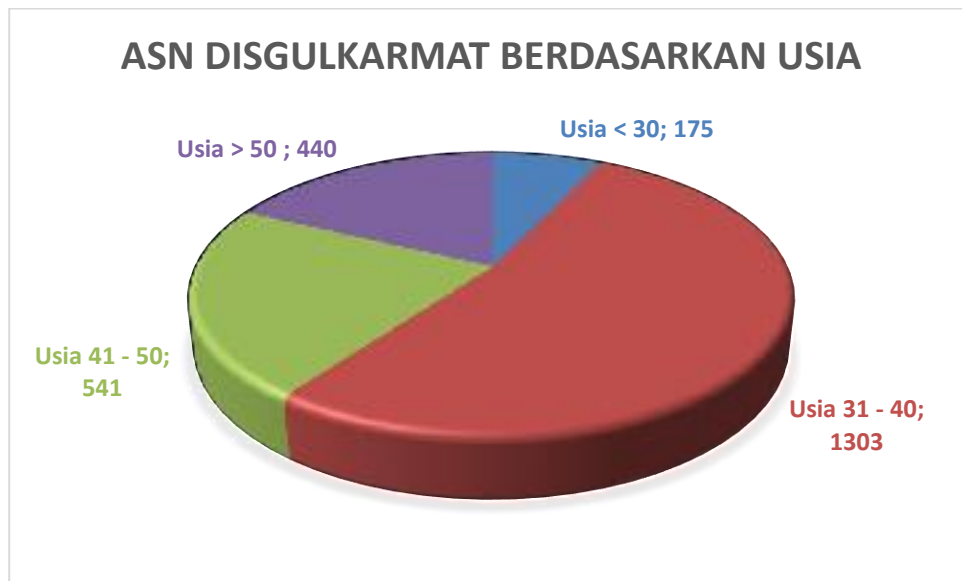
Gambar 1. 3 Proporsi SDM Dinas Disgulkarmat



Sumber: Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan, 1 Januari 2022

Jika dilihat berdasarkan usia ASN pada Disgulkarmat (Gambar 1.4), usia terbesar ada pada range 31 – 40 Tahun yang merupakan usia produktif dan cukup baik. Namun yang perlu diantisipasi adalah bahwa usia ASN diatas 50 tahun juga cukup besar, hingga perlu adanya rekrutmen pegawai dalam jumlah yang cukup besar dalam lima tahun mendatang

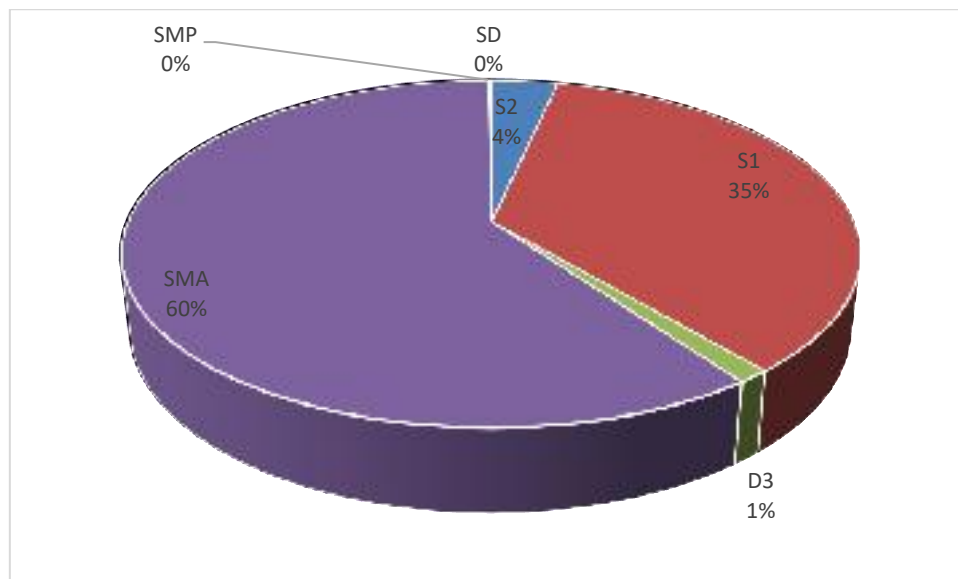
Gambar 1. 4 ASN Disgulkarmat Berdasarkan Usia



Sumber: Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan, 1 Januari 2022

Jika dilihat berdasarkan pendidikan pegawai, maka mayoritas pegawai Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan merupakan lulusan SMA yaitu sebanyak 60%. Berdasarkan data di atas pegawai Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan dengan lulusan S1 mencapai 35% dari total pegawai. Masih banyaknya pegawai dengan tingkat pendidikan SMA ini menunjukkan bahwa Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan masih memerlukan upaya untuk meningkatkan kompetensi para pegawai.

Gambar 1. 5 Jumlah Pegawai Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan berdasarkan Pendidikan



Sumber: Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan, 1 Januari 2022

1.5 Sarana dan Prasarana

Dalam menunjang kinerja, Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta saat ini memiliki Sarana dan Prasarana berupa kendaraan dinas operasional dan peralatan/perengkapan. Jenis dan jumlah kendaraan dinas operasional dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 1. 1 Data Kendaraan Dinas Operasional

No	Nama KDO	Jumlah KDO
1.	MOBIL POMPA	251
	Mobil Pompa 10.000 lt	40
	Mobil Pompa 4.000 lt	134
	Mobil Pompa 3.000 lt	1
	Mobil Pompa 2.500 lt	76
2.	KENDARAAN OPERASIONAL KARYAWAN	64
	Bus Besar	4
	Mini Bus	8
	Bus Karyawan	8
	Komando	32
	Sedan	5
	Avanza	1
	Van/ Lab	1
	Mobil Penyuluhan	4

Laporan Kinerja Dinas Penanggulangan kebakaran dan Penyelamatan Tahun 2020

No	Nama KDO	Jumlah KDO
	Pick Up Hilux	1
3	MOBIL TANGGA	18
4	MOBIL RESCUE & KHUSUS	372
	Mobil Strong Arm	4
	Mobil Submersible	21
	Mobil Submersible HOSE RECOVERY UNIT	1
	Mobil Smoke Removal	10
	Mobil Fast Attack	10
	Mobil Rapid Response	12
	Mobil Quick Response	94
	Mobil Water Mist	89
	Mobil Hose Retrival	20
	Mobil Rescue	66
	Mobil Operasional Sektor	33
	Mobil BA	9
	Mobil Heavy foam	1
	Mobil Keb. MRT	1
	Mobil Pengurai (Dokking)	1
5	MOBIL PENDUKUNG	94
	Mobil Ambulan	12
	Mobil Angkutan Barang	19
	Mobil Medan Berat	9
	Mobil Derek	5
	Unit Pos Pemadam bergerak	5
	Mobil Pendukung lainnya	44
6	SEPEDA MOTOR	340
	Sepeda motor Honda CB 100	98
	Sepeda Motor UPRC	84
	Sepeda Motor GW 250	20
	Sepeda Motor Viar	110
	Motor Cycle	8
	Sepeda pembuka jalan/peliputan	11
	Sepeda Motor lainnya	9
	TOTAL KDO	1139

Sumber: Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan, 1 Januari 2022

1.6 Aset Bangunan

Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan dalam menjalankan tugas dan fungsinya sangat sangat berorientasi dengan kecepatan waktu penyelesaiannya. Hal tersebut dikarenakan semakin cepat petugas datang ke tempat kejadian kebakaran ataupun penyelamatan maka akan meminimalkan resiko dan dampak akibat bahaya kebakaran atau bencana lainnya baik itu berupa nyawa ataupun harta benda. Berdasarkan Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pencegahan dan penanggulangan Bahaya Kebakaran pasal 33 bahwa dalam upaya menanggulangi kebakaran dan bencana lainnya di tingkat kecamatan dibentuk kantor sektor dan pada tingkat kelurahan dibentuk kantor pos pemadam. Sehingga idealnya di tiap Kecamatan di DKI Jakarta terdapat satu kantor sektor pemadam kebakaran dan di tiap kelurahan terdapat setidaknya satu kantor pos pemadam kebakaran. Pada kenyataannya kondisi ideal tersebut sangat sulit tercapai dikarenakan sulitnya mendapatkan lahan untuk dibangun kantor sektor dan pos di wilayah DKI Jakarta. Untuk mengatasi permasalahan tersebut Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan membuat alternatif solusi yaitu dengan adanya pos Non BMD atau Kepemilikan diluar milik daerah yaitu pos atau lahan yang dimiliki pihak swasta untuk ditempati oleh petugas pemadam untuk berjaga sebagai pos atau dengan menempatkan pos karavan/ pos bergerak, yaitu pos berbentuk mobil yang dapat dipindah-pindahkan sesuai dengan kebutuhan penjagaan. Data mengenai aset pos dan sektor Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan sebagaimana tercantum dalam Tabel 1.2.

Tabel 1. 2 Jumlah dan Status aset Pos dan Sektor

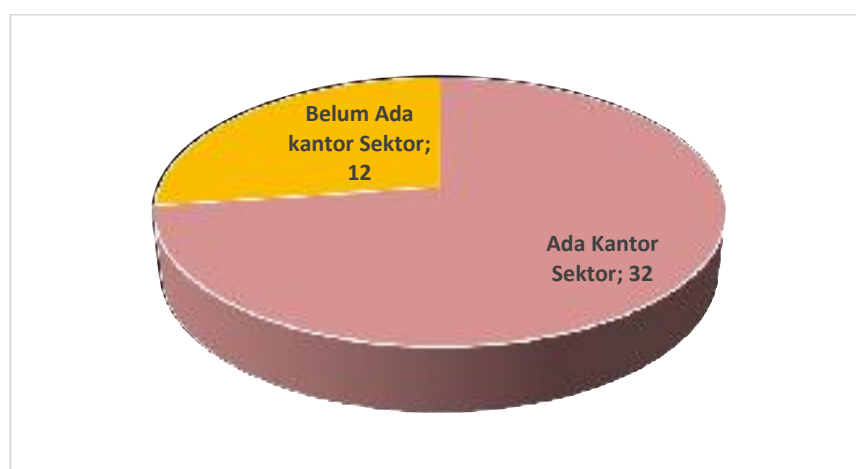
No	Sudin	Status Pos				TOTAL	Status Sektor			
		BMD	Non BMD	Swadaya	Pos Bergerak		BMD	Non BMD	Swadaya	TOTAL
1	Jakarta Pusat	13	4	0	4	21	5	0	0	5
2	Jakarta Utara	22	2	8	1	33	7	0	0	7
3	Jakarta Barat	16	8	7	1	32	8	0	0	8
4	Jakarta Selatan	17	8	0	1	26	4	0	0	4
5	Jakarta Timur	19	6	2	0	27	8	0	0	8
TOTAL		87	28	17	7	139	32	0	0	32

Sumber: Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan, 1 Januari 2022

Berdasarkan Tabel 1.2 diketahui bahwa Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan saat ini memiliki 139 Pos dan 32 Sektor. Dari 139 Pos yang ada 87 diantaranya adalah BMD/aset, ada juga Pos non-aset/non-BMD ataupun Pos MOU dengan pihak swasta/swadaya masyarakat dan pos bergerak.

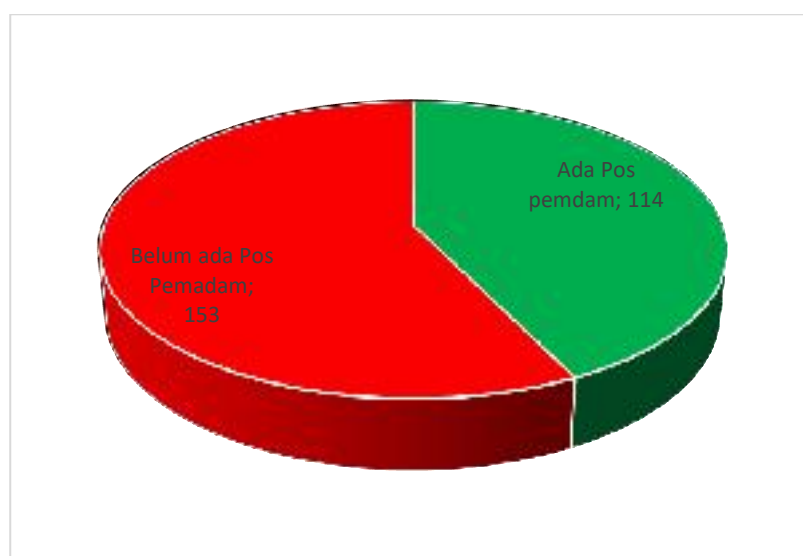
Adapun rasio jumlah sektor terhadap jumlah kecamatan seperti dalam gambar 1.6 dimana dari 44 kecamatan di DKI Jakarta terdapat 12 kecamatan yang belum memiliki kantor Sektor Pemadam. Sedangkan rasio jumlah Pos dengan kelurahan di DKI Jakarta seperti dalam gambar 1.7 yaitu dari 267 kelurahan di DKI terdapat 114 kelurahan yang telah memiliki pos pemadam kebakaran.

Gambar 1. 6 Rasio Kantor Sektor terhadap Jumlah Kecamatan



Sumber: Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan, 1 Januari 2022

Gambar 1. 7 Rasio Pos terhadap Jumlah Kelurahan



Sumber: Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan, 1 Januari 2022

1.7 Keuangan

Untuk mengidentifikasi potensi dan permasalahan khusus pada aspek anggaran pelayanan Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta pada level kinerja, akan dianalisis pengelolaan anggaran melalui pelaksanaan realisasi anggaran Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta periode perencanaan sebelumnya.

Berdasarkan data anggaran, terlihat bahwa pendanaan pelayanan atau pelaksanaan tugas fungsi Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan selama kurun waktu 2018-2021 sangat fluktuatif. Setelah sempat naik di tahun 2019 dengan anggaran sebesar Rp 1.363.627.156.747 dari tahun 2018 dengan anggaran Rp 1.115.804.326.993 dukungan pendanaan yang diperoleh Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan menurun pada tahun 2020 sebesar Rp 679.043.848.550. Menurunnya anggaran ini akibat adanya refofusing perihal pandemi covid-19 yang terjadi di provinsi DKI Jakarta. Sementara di Tahun 2021 porsi anggaran bertambah kembali menjadi Rp. 1.023.831.335.373,- seiring dengan adanya perbaikan ekonomi. Berikut rincian keuangan sejak Tahun 2018-2020, dapat dilihat dalam tabel 1.3.

Tabel 1. 3 Anggaran dan Realisasi Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan

JENIS BELANJA	PAGU ANGGARAN				REALISASI ANGGARAN				% PENYERAPAN			
	(RP)				(RP)				(%)			
	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
Belanja Pegawai	394.122.669.993	641.516.460.747	193.149.884.235	325.045.751.321	297.472.083.603	572.695.129.298	187.601.864.564	306.541.355.655	75,50%	89,30%	97,10%	94,31%
Belanja Program (diluar pegawai)	721.681.657.000	722.110.696.000	485.893.964.315	698.785.584.052	700.179.484.995	697.198.180.476	448.430.634.013	690.833.257.527	97,00%	96,50%	92,30%	98,86%
TOTAL	1.115.804.326.993	1.363.627.156.747	679.043.848.550	1.023.831.335.373	997.651.568.598	1.269.893.309.774	636.032.498.577	997.374.613.182	89,40%	93,10%	93,70%	97,42%

Sumber: Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan, Januari 2022

1.8 Sistematika Penulisan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan ini disusun dengan sistematika sebagai berikut

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini diuraikan mengenai Latar Belakang, Struktur Organisasi, Fungsi dan Tugas, Keadaan Sumber Daya Manusia (SDM), Sarana dan Prasarana, Kondisi Keuangan serta sistematika penulisan.

Bab II Perencanaan dan Penetapan Kinerja.

Pada bab ini berisikan mengenai Perencanaan Strategis Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan. Didalamnya dijelaskan pula Indikator sasaran serta program dan rencana aksi yang akan dicapai. Ada juga rencana anggaran tahun 2021 Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan yang didalamnya dijelaskan tentang alokasi anggaran untuk pelayanan internal dan alokasi anggaran per sasaran stragis. Lalu perjanjian kinerja tahun 2021 didalamnya dijelaskan perjanjian kinerja awal tahun 2021.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Bab ini menjelaskan tentang capaian kinerja tahun 2021 Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan yang didalamnya terdapat pengukuran capaian kinerja tahun 2021 dengan realisasi kinerja tahun sebelumnya, analisis penyebab keberhasilan/kegagalan dan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya. Lalu realisasi anggaran Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan

Bab IV Penutup

Pada bab ini menjelaskan harapan kepada seluruh unsur Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan dalam rangka upaya pencapaian target-target yang telah ditetapkan.

BAB II

PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA

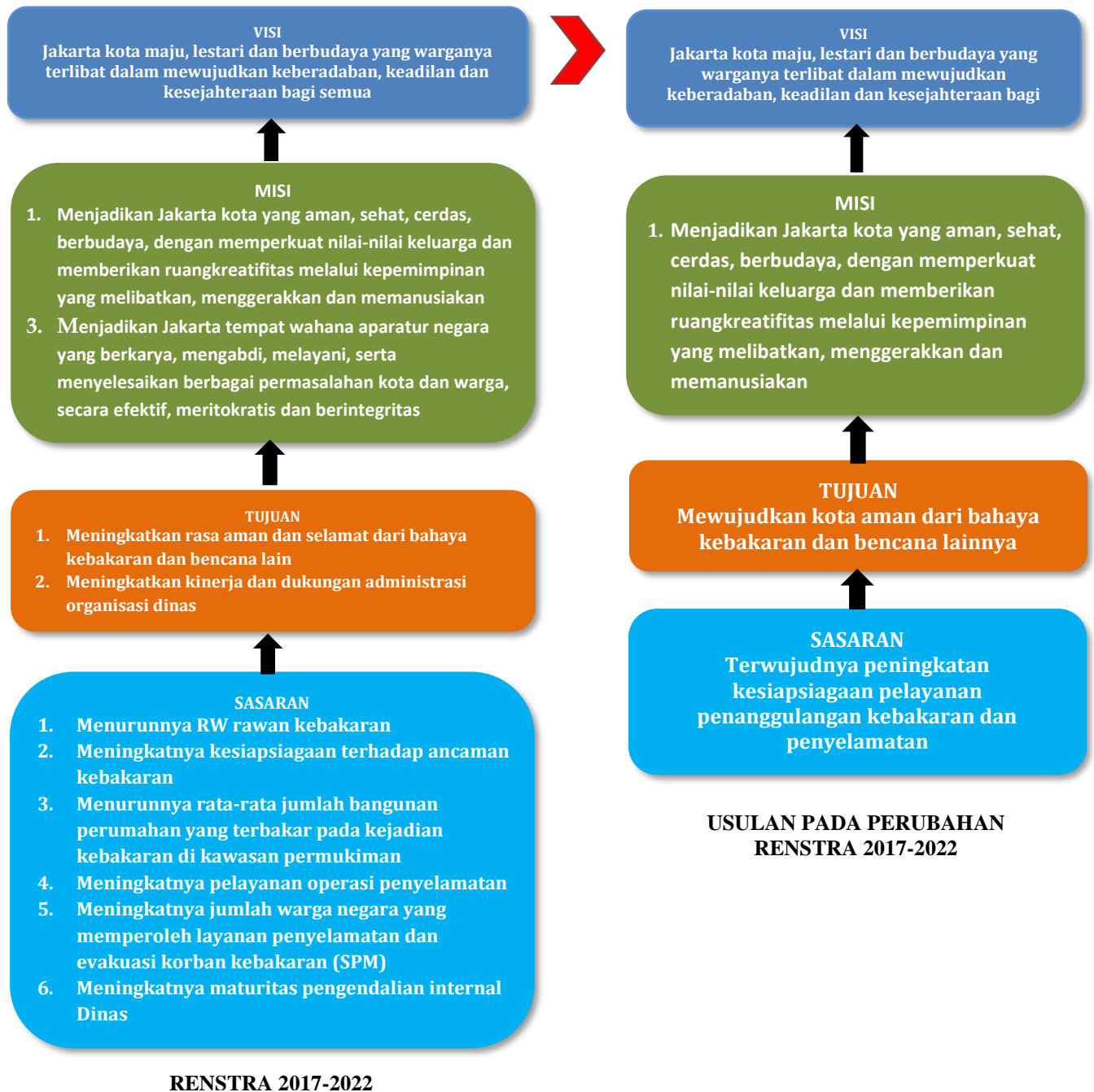
2.1 Perencanaan Strategis

Untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan tahun 2017-2022 sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2017-2022, Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta mendukung visi dan misi Gubernur Provinsi DKI Jakarta yang dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2022. Pada Tahun 2020 terdapat usulan Perubahan Renstra Tahun 2017 – 2022 dengan beberapa perubahan pada Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Secara garis besar perubahan keterkaitan antara Visi-Misi-Tujuan-Sasaran Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan akibat adanya usulan perubahan Renstra 2017-2022 dapat dilihat pada Gambar 2.1.

Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan yang menjalankan tugas dan fungsinya pada urusan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat mendukung satu Misi Gubernur yaitu **Menjadikan Jakarta kota yang aman, sehat, cerdas, berbudaya, dengan memperkuat nilai-nilai keluarga dan memberikan ruangkeaktifitas melalui kepemimpinan yang melibatkan, menggerakkan dan memanusiakan**, dengan tujuan Perangkat Daerah **Mewujudkan kota aman dari bahaya kebakaran dan bencana lainnya** serta sasaran Perangkat Daerah **Terwujudnya peningkatan kesiapsiagaan pelayanan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan**.

Laporan Kinerja Dinas Penanggulangan kebakaran dan Penyelamatan Tahun 2021

Gambar 2. 1 Keterkaitan antara Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran pada RPJMD 2017-2022 dan Rancangan Perubahan RPJMD Tahunin 2017-2022



Sumber: Renstra Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Tahun 2017-2022 dan Draft Perubahan Renstra Tahun 2017-2022

Beberapa hal yang signifikan berubah dengan adanya Perubahan Renstra Tahun 2017-2022 adalah:

1. Terdapat perubahan tujuan dari dua tujuan menjadi satu yaitu Mewujudkan kota aman dari bahaya kebakaran dan bencana lainnya. Perubahan jumlah tujuan adalah dalam rangka perbaikan cascading kinerja menyesuaikan dengan Program yang ada pada Permendagri 90 Tahun 2019 dimana jumlah program yang menaungi sub urusan kebakaran hanya terdapat satu program yaitu Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran, yang terdapat pada label provinsi dan kabupaten/kota.
2. Adanya Indikator Tujuan Perangkat Daerah yang menjadi Indikator Kinerja Utama

(IKU) Perangkat Daerah. Indikator tujuan Disgulkarmat adalah Rata-rata jumlah jiwa terdampak tiap kejadian kebakaran. Pada Renstra penetapan tahun 2017-2022 tidak terdapat indicator tujuan perangkat daerah mengikuti Permendagri 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

3. Terdapat pengurangan sasaran dari enam sasaran menjadi satu sasaran yaitu Terwujudnya peningkatan kesiapsiagaan pelayanan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan dengan indikator Tingkat kesiapsiagaan pelayanan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan. Pengurangan jumlah sasaran adalah dalam rangka perbaikan cascading kinerja menyesuaikan dengan Program yang ada pada Permendagri 90 Tahun 2019 dimana jumlah program yang menaungi sub urusan kebakaran hanya terdapat satu program yaitu Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran, yang terdapat pada label provinsi dan kabupaten/kota

Berdasarkan Dokumen Renstra Tahun 2017-2022 maka sasaran pada Disgulkarmat adalah sebagaimana terdapat pada Tabel 2.1.

Tabel 2. 1 Target Sasaran Strategis pada Dokumen RENSTRA Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Tahun 2017-2022

NO.	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA PADA TAHUN				
			2018	2019	2020	2021	2022
1	Menurunnya jumlah RW rawan kebakaran	Jumlah RW rawan kebakaran	156	131	106	81	56
2	Meningkatnya kesiapsiagaan terhadap ancaman kebakaran	Tingkat kesiapsiagaan terhadap ancaman kebakaran	5.2	5.90	6.59	7.28	8.04
3	Menurunnya rata-rata jumlah bangunan perumahan yang terbakar pada kejadian kebakaran di kawasan permukiman	Rata-rata jumlah perumahan yang terbakar tiap kejadian kebakaran di kawasan permukiman	3,04	2,95	2,86	2,77	2,68
4	Meningkatnya pelayanan operasi penyelamatan	Waktu rata-rata penanganan operasi penyelamatan	120 menit	110 menit	100 menit	90 menit	80 menit
5	Meningkatnya jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran (SPM)	Layanan Pemadaman Penyelamatan dan Evakuasi dalam tingkat waktu tanggap (response time)	100%	100%	100%	100%	100%

Laporan Kinerja Dinas Penanggulangan kebakaran dan Penyelamatan Tahun 2021

6	Meningkatnya maturitas pengendalian internal Dinas	Tingkat Maturitas Dinas	3,1	3,2	3,3	3,4	3,5
---	--	-------------------------	-----	-----	-----	-----	-----

Berdasarkan dokumen usulan Perubahan Renstra Tahun 2017-2022 maka target sasaran strategis berubah menjadi sebagaimana terdapat pada Tabel 2.2.

Tabel 2. 2 Target Sasaran Strategis pada Draft Dokumen Perubahan RENSTRA Dinas Penanggulangan Kebaran dan Penyelamatan Tahun 2017-2022

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA PADA TAHUN				
				2018	2019	2020	2021	2022
1	Meningkatkan rasa aman dan selamat dari bahaya kebakaran dan bencana lain		Rata-rata jumlah jiwa terdampak pada kejadian kebakaran	7.9	7.7	7.5	7.3	7.1
		Meningkatnya kesiapsiagaan terhadap ancaman kebakaran	Tingkat kesiapsiagaan terhadap ancaman kebakaran	4.8	5.1	5.4	5.8	6.2

2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2021

Berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB No 53/2014, Perjanjian Kinerja adalah dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Penugasan tersebut sebagai wujud komitmen antara penerima amanah dan pemberi amanah atas kinerja terukur berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumberdaya yang ada. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, agar terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Perjanjian Kinerja disusun dengan tujuan sebagai: (a) wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur; (b) tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur; (c) dasar penilaian keberhasilan atau kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi serta pemberian penghargaan dan sanksi; (d) dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan kinerja penerima amanah; (e) dasar dalam penetapan sasaran kinerja

Laporan Kinerja Dinas Penanggulangan kebakaran dan Penyelamatan Tahun 2021

pegawai. Dokumen tersebut berisi indikator kinerja utama beserta targetnya, dimana indikator kinerja tersebut memenuhi kriteria-kriteria yang ditetapkan, yaitu spesifik (specific), dapat diukur (measurable), dapat dicapai (attainable), keterkaitan (relevant), berjangka waktu tertentu (time bound), dan dapat dipantau pelaksanaannya.

Tabel 2. 3 Formulir Penetapan Kinerja Tahun 2021

NO	Sasaran Kinerja	No	Indikator Kinerja	Target	Satuan
Sasaran Strategis					
1	Mewujudkan kota aman dari bahaya kebakaran dan bencana lainnya	1	Rata-rata jumlah jiwa terdampak tiap kejadian kebakaran	7,3	jiwa/kejadian
2	Terwujudnya peningkatan kesiapsiagaan pelayanan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan	1	Tingkat kesiapsiagaan pelayanan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan	5,80	skor
3	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel	1	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran	91	persen
4	Meningkatnya pertumbuhan investasi		Persentase penyelesaian rencana aksi Reform Perizinan untuk Percepatan Ease of Doing Business (EoDB) (17)	100	persen
5	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel	1	Persentase penyelesaian rencana aksi Mewujudkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dengan Predikat AA (39)	100	persen
		2	Persentase penyelesaian rencana aksi Peningkatan Kualitas Kinerja Pemerintahan (61)	100	persen
6	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel serta berbasis teknologi informasi	1	Persentase penyelesaian rencana aksi Implementasi SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) (63)	100	persen
7	Terwujudnya Jakarta kota tangguh bencana	1	Persentase penyelesaian rencana aksi Pengelolaan pengurangan risiko bencana daerah (67)	100	persen
8	Terbangunnya kota yang berwawasan tata ruang dan lingkungan sebagai perwujudan kota yang berkelanjutan dan lestari	1	Persentase penyelesaian rencana aksi Mitigasi dan Adaptasi Bencana Iklim (72)	100	persen
Sasaran Khusus					
9	Pemenuhan SPM ketercapaian layanan pemadaman	1	Persentase layanan pemadaman dalam waktu tanggap (response time) 15 menit	97	Persentase

Laporan Kinerja Dinas Penanggulangan kebakaran dan Penyelamatan Tahun 2021

NO	Sasaran Kinerja	No	Indikator Kinerja	Target	Satuan
10	Terbitnya Sertifikat Keselamatan Kebakaran	1	Persentase terpenuhinya layanan Inspeksi Keselamatan Kebakaran	100	Persentase
11	Meningkatnya Pemanfaatan E-Purchasing dalam Pengadaan Barang dan Jasa	1	Persentase Pemanfaatan E-Order	100	Persentase
12	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel	1	Opini laporan keuangan daerah	3	WTP
13	Terimplementasinya rencana strategis komunikasi publik untuk program-program umum dan unggulan Perangkat Daerah	1	Persentase implementasi rencana strategi komunikasi publik program-program umum dan unggulan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.	100	Persentase
14	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel	1	Predikat SAKIP Perangkat Daerah	A (81)	Nilai
15	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan serta peningkatan produktivitas dan integritas aparatur	1	Nilai PMP RB Perangkat Daerah	92	Persen
Sasaran Operasional					
16	Terselesaikannya Tindak Lanjut Arahan Gubernur	1	Persentase capaian penyelesaian Tindak Lanjut Arahan Gubernur	100	Persentase
17	Meningkatnya penyelesaian pengaduan masyarakat	1	Persentase capaian penyelesaian pengaduan masyarakat	100	Persentase
18	Meningkatnya kualitas layanan kepada masyarakat	1	Survei Kepuasan Masyarakat	86	Indeks
19	Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	1	Persentase progress penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	100	Persentase

Perjanjian Kinerja Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Tahun 2021 sebagaimana pada Tabel 2.4 terdiri dari:

1. Sasaran Strategis yang merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang terdiri dari tujuan dan sasaran PD pada Renstra serta Indikator Rencana Aksi pada Kegiatan Strategis Daerah (KSD) yang ditetapkan sesuai Keputusan Gubernur Nomor 1263 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Gubernur Nomor 1042 Tahun 2018 tentang Daftar Kegiatan Strategis Daerah dan Keputusan Gubernur Nomor 879 Tahun 2021 tentang Penetapan Kategori dan Pembobotan Kegiatan Strategis Daerah.

2. Sasaran Khusus merupakan sasaran khusus yang diharapkan dicapai oleh Perangkat Daerah
3. Sasaran Operasional merupakan kinerja yang merupakan tindak lanjut arahan gubernur, tindak lanjut aduan masyarakat, survei kepuasan masyarakat dan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK.

2.3 Rencana Anggaran Tahun 2021

a. Alokasi Anggaran Untuk Pelayanan Internal

Untuk pelayanan internal pembiayaan pelaksanaan kegiatan Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan dialokasikan dalam Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Tahun 2021 sebesar Rp 97.016.371.210,- pada Anggaran Penetapan dan Rp 84.318.897.501,- pada Anggaran Perubahan yang terdiri dari dua program yaitu, 1). Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi sebesar Rp 69.800.528.914 pada Anggaran Penetapan dan Rp 63.809.552.569 pada Anggaran Perubahan, 2). Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kota/Kabupaten sebesar Rp 27.215.842.296 pada Anggaran Penetapan dan Rp 20.509.344.932 pada Anggaran Perubahan

b. Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis

Untuk mencapai sasaran dan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja tahun 2021, pembiayaan pelaksanaan kegiatan Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan dialokasikan dalam Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Tahun 2021. Alokasi anggaran Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan pada tahun 2021 pada anggaran penetapan sebesar Rp **1.123.844.431.718,-**, yang terdiri dari Belanja Pegawai sebesar Rp 755.737.101.698,- dan Belanja Program (diluar pegawai) sebesar Rp 368.107.330.020,-. Anggaran Pegawai merupakan bagian dari anggaran pada Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi.

Alokasi anggaran berdasarkan sasaran strategis berikut program pendukungnya dapat dilihat pada tabel 2.3

Tabel 2. 4 Alokasi Anggaran per Sasaran Strategis Tahun 2021

No	Sasaran Strategis	Program Pendukung	Anggaran Penetapan	Anggaran Perubahan
1	Mewujudkan kota aman dari bahaya kebakaran dan bencana lainnya	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	271.090.958.810	240.726.853.820
2	Terwujudnya peningkatan kesiapsiagaan pelayanan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan			

Laporan Kinerja Dinas Penanggulangan kebakaran dan Penyelamatan Tahun 2021

No	Sasaran Strategis	Program Pendukung	Anggaran Penetapan	Anggaran Perubahan
3	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	825.537.630.612	762.595.136.621
		Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kota/Kabupaten	27.215.842.296	20.509.344.932
		TOTAL	1.123.844.431.718	1.023.831.335.373

Jumlah Anggaran Belanja **Penetapan** Tahun 2021 : **1.123.844.431.718,-**

Jumlah Anggaran Belanja Program (diluar pegawai) : 69.800.528.914,-

Jumlah Anggaran Belanja Pegawai : 755.737.101.698,-

Jumlah Anggaran Belanja **Perubahan** Tahun 2021 : **1.023.831.335.373,-**

Jumlah Anggaran Belanja Program (diluar pegawai) : 63.809.552.569,-

Jumlah Anggaran Belanja Pegawai : 698.785.584.052,-

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Berdasarkan pasal 1 ayat 14 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah menyebutkan bahwa Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/ target Kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik. Sehingga Akuntabilitas Kinerja Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta merupakan perwujudan dari pelaksanaan kewajiban dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan kinerja pelayanan perlindungan masyarakat dalam Rencana Strategis Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2022 yang kemudian diusulkan perubahan menjadi Draft Dokumen Rencana Strategis Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2022.

Keberhasilan/kegagalan kinerja tersebut diukur berdasarkan pencapaian sasaran strategis yang berpengaruh terhadap pencapaian visi misi dan tujuan (goal) yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan dan juga kinerja lain yang ditetapkan pada dokumen perjanjian kinerja Tahun 2021.

3.1 Capaian Kinerja Tahun 2021

Dalam Lampiran II Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah disebutkan bahwa salah satu pondasi utama dalam menerapkan manajemen kinerja adalah pengukuran kinerja dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi output dan outcome yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang (seharusnya) terjadi dengan kinerja yang diharapkan. Pengukuran kinerja ini dilakukan secara berkala triwulan dan tahunan. Pengukuran dan perbandingan kinerja dalam laporan kinerja harus cukup menggambarkan posisi kinerja instansi pemerintah. Pengukuran kinerja sasaran strategis Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta dilaksanakan dengan membandingkan indikator kinerja sasaran yang bersifat

outcome atau output realisasi kinerja aktual tahun 2010 dengan target, sehingga diperoleh capaian kinerja dalam bentuk persentase.

Pengukuran kinerja tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen RENSTRA Tahun 2017-2022 dan Draft Dokumen Perubahan RENSTRA Tahun 2017-2022. Data kinerja aktual diperoleh dari sumber data primer maupun sekunder melalui sistem informasi pengumpulan data kinerja. Data kinerja aktual berasal dari data kinerja Sekretariat, Bidang dan UPT yang disajikan dalam Laporan Kinerja Triwulan yang diperlukan kemudian diolah, dievaluasi dan di analisis untuk memperoleh data realisasi kinerja yang relevan dengan sasaran stratejik Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta. Formulir yang dipergunakan untuk mengukur kinerja adalah formulir pengukuran kinerja, rencana kinerja tahunan dan penetapan kinerja. Pengukuran Kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap indikator dengan realisasinya. Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih atau celah kinerja (*Pertormance gap*). Selanjutnya berdasarkan selisih kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan kinerja di masa mendatang (*Performance improvement*).

Tabel 3. 1 Interpretasi Capaian Kinerja Sasaran

No	Interval Persentase Capaian	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1	> 90	Sangat Tinggi	Hijau Tua
2	76 ≤ 90	Tinggi	Hijau Muda
3	66 ≤ 75	Sedang	Kuning Tua
4	51 ≤ 65	Rendah	Kuning Muda
5	≤50	Sangat Rendah	Merah

Sumber: Permendagri 54 Tahun 2010

3.1.1. Capaian Indikator Sasaran

Berdasarkan dokumen perjanjian kinerja Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021 terdapat 8 (delapan) sasaran strategis (3 indikator kinerja utama (IKU) dan 5 indikator Kegiatan Strategis Daerah), 7 (tujuh) sasaran kusus, dan 4 (empat) sasaran operasional. Pengukuran tingkat capaian kinerja indikator tersebut dilakukan dengan cara membandingkan antara target indikator sasaran yang telah ditetapkan dengan realisasinya. Sampai dengan akhir tahun 2021 Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta telah melaksanakan seluruh sasaran yang ditetapkan. Semua sasaran tersebut dapat dikatakan berhasil dicapai dengan sangat tinggi. Adapun hasil

Laporan Kinerja Dinas Penanggulangan kebakaran dan Penyelamatan Tahun 2021

pengukuran indikator kinerja tahun 2021 sebagaimana yang tergambar pada Tabel 3.2 berikut

Tabel 3. 2 Capaian Perjanjian Kinerja Tahun 2021

NO	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
Sasaran Strategis					
1	Rata-rata jumlah jiwa terdampak tiap kejadian kebakaran	jiwa/kejadian	7,3	5,62	123%
2	Tingkat kesiapsiagaan pelayanan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan	skor	5,80	5,97	103%
3	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran	persen	91	99,40	109%
4	Persentase penyelesaian rencana aksi Reform Perizinan untuk Percepatan Ease of Doing Business (EoDB) (17)	persen	100	100	100%
5	Persentase penyelesaian rencana aksi Mewujudkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dengan Predikat AA (39)	persen	100	100	100%
	Persentase penyelesaian rencana aksi Peningkatan Kualitas Kinerja Pemerintahan (61)	persen	100	100	100%
6	Persentase penyelesaian rencana aksi Implementasi SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) (63)	persen	100	100	100%
7	Persentase penyelesaian rencana aksi Pengelolaan pengurangan risiko bencana daerah (67)	persen	100	100	100%
8	Persentase penyelesaian rencana aksi Mitigasi dan Adaptasi Bencana Iklim (72)	persen	100	100	100%
Sasaran Khusus					
9	Persentase layanan pemadaman dalam waktu tanggap (response time) 15 menit	Persentase	97	99,93	103%
10	Persentase bangunan gedung diperiksa dan mendapatkan rekomendasi teknis	Persentase	100	100	100%
11	Persentase Pemanfaatan E-Order	Persentase	100	100	100%
12	Opini laporan keuangan daerah	WTP	3	3	100%
13	Persentase implementasi rencana strategi komunikasi publik program-program umum dan unggulan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.	Persentase	100	100	100%
14	Predikat SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	A (81)	93,48	115%
15	Nilai PMP RB Perangkat Daerah	Persen	92	88,73	96%
Sasaran Operasional					
16	Persentase capaian penyelesaian Tindak Lanjut Arahan Gubernur	Persentase	100	100	100%

NO	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
17	Persentase capaian penyelesaian pengaduan masyarakat	Persentase	100	99,07	99,07%
18	Survei Kepuasan Masyarakat	Indeks	86	87	101%
19	Persentase progress penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	Persentase	100	100	100%

Secara keseluruhan tingkat capaian kinerja Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta adalah sebesar 102,54%, yang dihitung berdasarkan persentase rata-rata capaian dari seluruh indikator baik indicator dari sasaran strategis, sasaran khusus dan operasional. Dari 19 sasaran tersebut, rata-rata capaian realisasi sasaran dinyatakan SANGAT TINGGI dengan kriteria capaian rata-rata seluruh sasaran sebesar 102,54%.

3.1.2. Analisis Capaian Kinerja

Analisa dan evaluasi capaian Indikator Kinerja Utama tahun 2021 dari Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta sebagaimana data pada Tabel 3.2 dapat dijabarkan capaian realisasi masing-masing IKU, terdiri dari:

SASARAN 1: Mewujudkan kota aman dari bahaya kebakaran dan bencana lainnya

IKU 1: Rata-rata jumlah jiwa terdampak tiap kejadian kebakaran

Indikator Kinerja Utama (IKU) menurunnya Rata-rata jumlah jiwa terdampak tiap kejadian kebakaran merupakan IKU yang bersumber dari indicator tujuan perangkat daerah pada draft Dokumen Perubahan Renstra Tahun 2017-2022. IKU ini memiliki capaian yang sangat tinggi sebesar 123%. Realisasi IKU Rata-rata jumlah jiwa terdampak tiap kejadian kebakaran diperoleh dengan menghitung jumlah warga terdampak kebakaran di seluruh wilayah DKI Jakarta dibagi dengan frekuensi kebakaran di DKI Jakarta sepanjang Tahun 2021.

Rata-rata jumlah jiwa terdampak:

$$= \frac{\text{Jumlah warga terdampak kebakaran}}{\text{Jumlah kebakaran}} \times 100\%$$

$$= \frac{8626 \text{ jiwa}}{1535 \text{ kejadian}} \times 100\% = 5,62 \text{ jiwa/kejadian}$$

Ketercapaian kinerja tersebut didukung karena kesiapan operasional petugas pemadam kebakaran dalam mencapai response time dan juga kesigapan petugas untuk segera memadamkan kebakaran secepat mungkin. Semakin cepat response time (waktu yg diperlukan dari terima laporan sampai dengan unit pertama sampai ke lokasi kejadian kebakaran) maka semakin cepat pula langkah antisipasi yang bisa

dilakukan sehingga kebakaran tidak meluas dan meminimalisir warga yang terdampak kebakaran.

Beberapa Program/Kegiatan/Sub Kegiatan/Kinerja lainnya yang mendukung ketercapaian IKU tersebut adalah:

1. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran.

Salah satu indicator Program tersebut adalah Persentase (pemadaman) penanggulangan kebakaran yang berhasil dimana sebuah operasi pemadaman dikatakan berhasil jika memenuhi kriteria:

- a. Kejadian kebakaran yang dapat dipadamkan dalam waktu <120 menit
- b. Kejadian kebakaran yang memiliki Respond time kurang dari 15 menit
- c. Kejadian kebakaran yang "zero incident" (tidak ada korban jiwa & kecelakaan) pada petugas pemadam kebakaran.

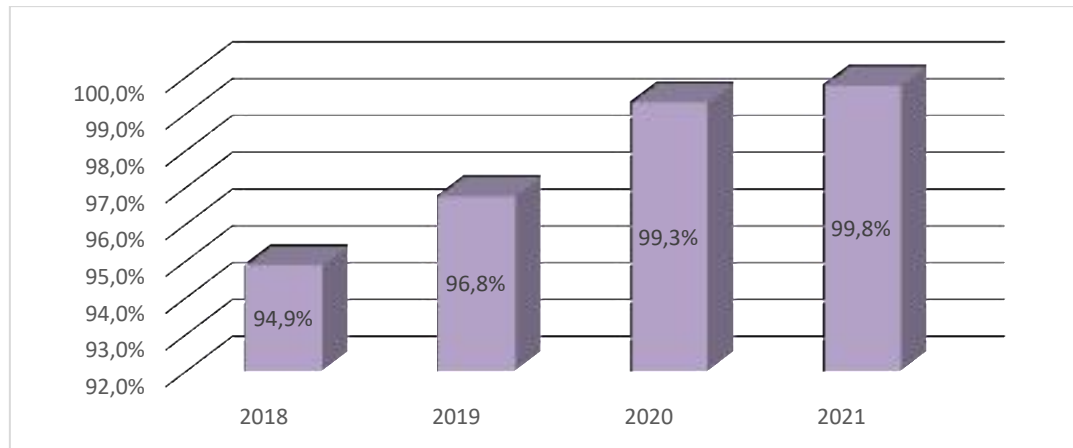
Pada Tahun 2021 terdapat 1535 kejadian kebakaran dengan jumlah kejadian pemadaman kebakaran sebanyak 1486 kejadian sehingga realisasi indicator Persentase (pemadaman) penanggulangan kebakaran yang berhasil sebesar

$$= \frac{\text{Jumlah kebakaran yang dinyatakan berhasil}}{\text{Jumlah kebakaran}} \times 100\%$$
$$= \frac{1486}{1535} \times 100\% = 96,81\%$$

Ketercapaian program tersebut didukung oleh beberapa Sub Kegiatan diantaranya:

- a. Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota dengan indicator kinerja Sub Kegiatan Waktu rata-rata respon (average response time) layanan penanggulangan kebakaran dengan target 15 menit. Kinerja Sub Kegiatan ini memiliki target minimize yang artinya semakin kecil realisasi semakin baik. Rata-response time adalah menghitung rata-rata response time dari seluruh kejadian kebakaran di DKI Jakarta. Pada Tahun 2021 rata-rata response time DKI Jakarta sebesar 7,4 menit dengan tingkat ketercapaian 151%. Rata-rata Response time DKI Jakarta sudah melampaui dari target yang ditetapkan dalam Standar Pelayanan Minimum sebesar 15 menit.
2. Sasaran Khusus- Pemenuhan SPM sub urusan kebakaran yaitu dengan indikator Ketercapaian Layanan Response time kebakaran (15 menit). Pada Tahun 2021 persentase layanan pemadaman kebakaran yang memenuhi response time 15 menit sebanyak 99,8%.

Gambar 3. 1 Grafik Trend Ketercapaian Layanan Response time kebakaran (15 menit) Tahun 2018-2021

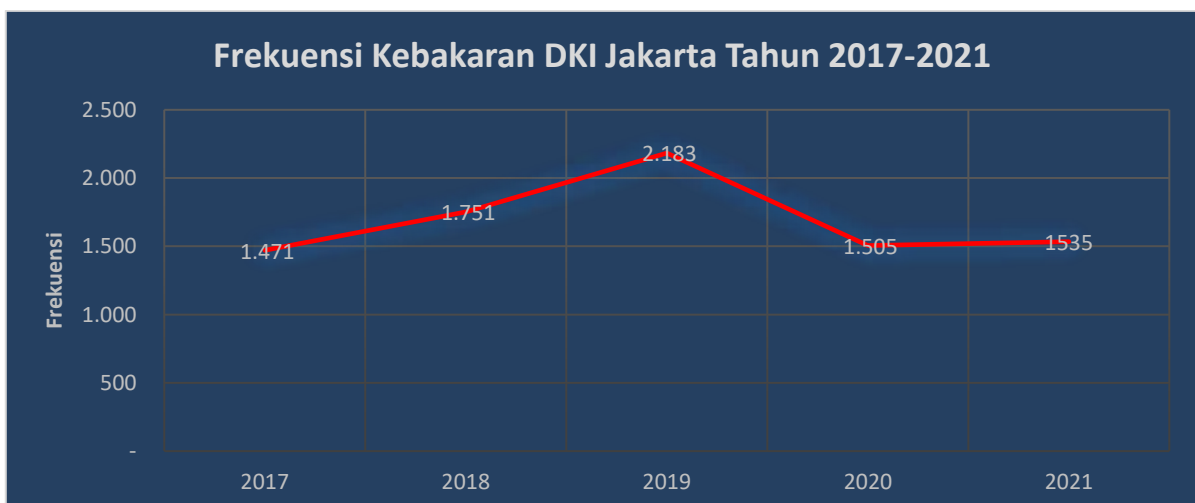


Sumber: Dinas Penanggulangan Kebakaran, 2021

Trend ketercapaian layanan response time kebakaran (15 menit) Provinsi DKI Jakarta dari Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2021 meningkat, hal ini menunjukkan kinerja yang sangat baik dengan berbagai macam usaha yang dilakukan diantaranya meningkatkan kesiapsiagaan petugas dan juga peningkatan jumlah Pos MoU dengan swasta dan masyarakat sehingga meningkatkan kecepatan waktu respon petugas ke lokasi kebakaran.

Selain ketercapaian layanan response time yang meningkat trend frekuensi kebakaran di DKI Jakarta menunjukkan kinerja positif dengan trend mempertahankan penurunan frekuensi kebakaran pada tahun 2020 yang menurun dari tahun 2019 sebagaimana pada grafik 3.2.

Gambar 3. 2 Grafik Frekuensi Kebakaran DKI Jakarta Tahun 2017-2021



Sumber: Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan, 2022

Pada Tahun 2021 Frekuensi kebakaran yang terjadi di DKI Jakarta sebesar 1535 meningkat 2% dari tahun 2020 yang mampu menurunkan frekuensi kebakaran sebesar 31%. Kinerja mempertahankan penurunan frekuensi kebakaran ini perlu

dipertahankan agar tingkat kerawanan kebakaran DKI Jakarta dapat terus menurun.

SASARAN 2: Terwujudnya peningkatan kesiapsiagaan pelayanan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan

IKU 2: Tingkat kesiapsiagaan pelayanan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan

Sasaran terwujudnya peningkatan kesiapsiagaan pelayanan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan merupakan IKU yang bersumber dari indikator sasaran perangkat daerah pada draft Dokumen Perubahan Renstra Tahun 2017-2022. IKU ini memiliki capaian yang sangat tinggi sebesar 103%. Realisasi IKU Tingkat kesiapsiagaan pelayanan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan diperoleh dengan:

***Tingkat kesiapsiagaan pelayanan gulkarmat =
indeks kesiapsiagaan SDM + indeks kesiapsiagaan sarana prasarana +
indeks kesiapsiagaan masyarakat***

Tingkat kesiapsiagaan pelayanan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan merupakan indeks yang menyatakan kesiapsiagaan dalam menghadapi kebakaran yang terbagi menjadi 3 (tiga) parameter yaitu kesiapsiagaan SDM aparatur, kesiapsiagaan sarana prasarana, dan kesiapsiagaan masyarakat dalam penanggulangan kebakaran. Masing-masing parameter tersebut kemudian dibobotkan berdasarkan kepentingan penanganan pada saat bencana. SDM aparatur memiliki bobot 50%, sarana 20%, prasarana 15% dan masyarakat 15%. Penjelasan target dan realisasi tingkat kesiapsiagaan pelayanan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan tahun 2021 terdapat pada tabel 3.3.

Tabel 3. 3 Target dan Realisasi Tingkat Kesiapsiagaan Pelayanan Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan

Indikator Sasaran	Parameter	Bobot Parameter	Parameter pengukurannya	Target 2021		Realisasi 2021	
				Parameter	Indeks	Parameter	Indeks
Tingkat kesiapsiagaan pelayanan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan	SDM	0,50	Persentase rata-rata kompetensi petugas berdasarkan Diklat Damkar 1, Diklat Fire Rescue, dan Diklat MFR	53,25	2,66	54,19	2,71
	Sarana	0,20	Persentase mobil pompa dalam kondisi laik (usia dibawah 15 tahun dan kondisi baik) dan	80,49	1,61	84,5	1,69
	Prasarana	0,15	Persentase kelurahan yg memiliki pos/sektor	43,45	0,65	52,10	0,78

Kesiapsiagaan Masyarakat	0,15	Persentase RW yg sudah tersosialisasi di DKI Jakarta	59,00	0,89	52,30	0,78
TOTAL INDEKS KESIAPSIAGAAN PELAYANAN KEBENCANAAN DAERAH (%capaian parameter x Bobot parameter)/10				5,8		5,97

Penjelasan perhitungan pada tabel 3.3 adalah sebagai berikut:

A. Parameter Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur

- a. Capaian parameter SDM merupakan Persentase rata-rata kompetensi petugas berdasarkan Diklat Damkar 1, Diklat Fire Rescue, dan Medical First Responder. Pada Tahun 2021 realisasi sebesar 54,19% dengan perhitungan:

$$= \frac{\% \text{mengikuti Damkar 1} + \% \text{mengikuti Fire Rescue} + \% \text{mengikuti MFR}}{3}$$

$$= \frac{100\% + 35,9\% + 26,7\%}{3} = 54,19\%$$

- b. Capaian indeks berdasarkan parameter SDM sebesar 2,71 dengan perhitungan:

$$= \frac{(\% \text{capaian parameter} \times \text{Bobot Parameter})}{10}$$

$$= \frac{54,19 \times 0,50}{10} = \mathbf{2,71}$$

B. Sarana Prasarana

- a. Capaian parameter sarana prasarana terdiri dari 2 hal yaitu persentase Kelurahan yang memiliki pos/sektor pemadam dengan capaian 52,19% dengan perhitungan

$$= \frac{\text{Jumlah kelurahan yang memiliki Pos/Sektor}}{\text{Jumlah kelurahan di DKI Jakarta}} \times 100\%$$

$$= \frac{139}{267} \times 100\% = 52,19\%$$

- b. Capaian indeks berdasarkan parameter sarana prasarana Pos/Sektor sebesar 0,78 dengan perhitungan

$$= \frac{(\% \text{capaian parameter} \times \text{Bobot Parameter})}{10}$$

$$= \frac{52,19 \times 0,15}{10} = \mathbf{0,78}$$

- c. Capaian parameter sarana prasarana berdasarkan persentase kelaikan mobil pompa dengan capaian 84,5% dengan perhitungan

$$= \frac{\text{Jumlah mobil pompa yg laik (usia < 15th dan dapat beroperasi)}}{\text{Jumlah mobil pompa}} \times 100\%$$

$$= \frac{212}{251} \times 100\% = 84,5\%$$

- d. Capaian indeks berdasarkan parameter sarana prasarana mobil pompa sebesar 0,845 dengan perhitungan

$$= \frac{(\% \text{capaian} \times \text{Bobot SKPD} \times \text{Bobot Parameter})}{10} \times 100\%$$

$$= \frac{84,50 \times 0,20}{10} = 1,69$$

C. Kesiapsiagaan Masyarakat

- a. Capaian parameter kesiapsiagaan masyarakat sebesar 52,3% dengan perhitungan

$$= \frac{\text{jumlah RW yang telah dilakukan sosialisasi pencegahan dan penanggulangan kebakaran}}{\text{jumlah RW di DKI Jakarta}}$$
$$= \frac{1435}{2742} = 52,3\%$$

- b. Capaian indeks berdasarkan parameter kesiapsiagaan masyarakat sebesar 0,392

$$= \frac{(\% \text{capaian parameter} \times \text{Bobot Parameter})}{10}$$
$$= \frac{52,30 \times 0,15}{10} = 0,78$$

Realisasi tingkat kesiapsiagaan layanan penanggulangan Kebakaran dan penyelamatan = SDM + Sarana Prasarana + Kesiapsiagaan Masyarakat

$$= 2,71 + (1,69 + 0,78) + 0,78$$
$$= 5,97$$

Ketercapaian tingkat kesiapsiagaan layanan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan didukung oleh kinerja Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan yang tetap berusaha menjalankan target yang ada ditengah keterbatasan anggaran dan juga keterbatasan ruang gerak karena adanya pandemi covid-19.

Beberapa Program/Kegiatan/Sub Kegiatan/Kinerja lainnya yang mendukung ketercapaian IKU tersebut adalah:

1. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran.

Salah satu indikator program tersebut adalah tingkat kerawanan kebakaran dengan target pada Tahun 2021 sebesar 3,5. Realisasi tingkat rawan kebakaran sebesar 3,55 dengan capaian 98,59%.

Tingkat rawan kebakaran merupakan indeks yang menyatakan kerawanan kebakaran pada wilayah DKI Jakarta yang dihitung berdasarkan rata-rata tingkat rawan kebakaran kelurahan. Perhitungan tingkat rawan kebakaran didasarkan pada 3 kriteria yaitu:

- 1) frekuensi kebakaran per kelurahan dibagi menjadi 3 range yaitu kerawanan rendah (<1/3 frekuensi kebakaran tertinggi pd kelurahan), sedang (1/3 sampai dengan 2/3 frekuensi tertinggi pada kelurahan), tinggi (>2/3 frekuensi kebakaran tertinggi pd kelurahan) dengan bobot masing-masing 1,2,3.

- 2) persen RW yg telah tersosialisasi pencegahan dan penanggulangan kebakaran dibagi menjadi 3 yaitu rendah (jika >67%RW pada kelurahan tersebut telah tersosialisasi), sedang (jika 33-67% pada kelurahan tersebut telah tersosialisasi), tinggi (jika kurang dari 33% pada kelurahan tersebut telah tersosialisasi) dengan bobot masing-masing 1,2,3.
- 3) Ada tidaknya pos pada kelurahan tersebut diberikan bobot 2 jika ada pos damkar dan 1 jika tidak ada pos.

$$\text{Tingkat Rawan kebakaran DKI Jakarta} = \frac{\sum \text{tingkat rawan kebakaran kelurahan}}{\text{jumlah kelurahan di DKI Jakarta}}$$

Ketercapaian tingkat rawan kebakaran sangat mendukung ketercapaian kesiapsiagaan layanan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan.

2. Sub Kegiatan Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota. Pada Tahun 2021 terjadi refocusing anggaran pada pada Dinas Gulkarmat yang menyebabkan Sub Kegiatan Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota dimatikan anggarannya, sementara sub kegiatan tersebut berisi Diklat Fire Rescue dan Diklat Medical First Responder yang sangat mempengaruhi pencapaian sasaran tingkat kesiapsiagaan layanan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan berdasarkan parameter kesiapsiagaan SDM aparatur. Oleh karena itu Dinas Gulkarmat tetap menyelenggarakan Diklat Fire Rescue dan Diklat Medical First Responder tanpa anggaran dengan jumlah peserta sebanyak 90 orang untuk masing-masing jenis diklat.

3. **KSD 67-** Pengelolaan dan Pengurangan Risiko Bencana Daerah.

Dinas Penanggulangan Kebakaran dalam pencapaian sasaran kesiapsiagaan layanan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan didukung oleh KSD 67 (Pengelolaan dan Pengurangan Risiko Bencana Daerah) dimana terdapat satu rencana aksi yang menjadi tanggung jawab Disgulkarmat yaitu Optimalisasi Pelaksanaan Gerakan Warga Cegah Kebakaran. Terdapat 4 target yang harus dilaksanakan oleh damkar yaitu:

- a. Penempelan Stiker rawan kebakaran di pemukiman (rumah-rumah), kelurahan dan kecamatan yang dinilai rawan kebakaran Melibatkan Tim PRB, MPBI, dan Jakarta Berketahanan, Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan, PLN, dan Kelurahan. Target ini berhasil dilaksanakan dengan jumlah total rumah yang dilaksanakan penempelan stiker rawan kebakaran sebanyak 3371 rumah
- b. Tersedianya tim relawan penanggulangan kebakaran di 44 kecamatan. Target ini telah selesai dilaksanakan oleh Disgulkarmat dengan total jumlah relawan yang telah terdata sebanyak 2565 orang.

- c. Tersedianya sistem/jalur komunikasi untuk pengendalian kebakaran dalam skala komunitas. Untuk mengantisipasi kecepatan penerimaan penginformasian Ketika terjadi kebakaran maka diperlukan jalur komunikasi berbasis komunitas sehingga dapat menjadi alternatif pelaporan ketika terjadi kebakaran selain dari media yang telah ditetapkan dalam pelaporan kebakaran seperti kanal 112, Jakarta aman, atau telepon langsung ke nomor Sudin Gulkarmat. Jalur komunikasi yang dilaporkan oleh Disgulkarmat adalah berbentuk whatsapp group komunitas yang dibentuk oleh Sektor/Pos di tingkat kecamatan/kelurahan untuk dijadikan sarana penyampaian laporan kejadian kebakaran atau penyelamatan. Tahun 2021 telah terbentuk sebanyak 234 whatsapp group di 44 kecamatan di DKI Jakarta.
- d. Tersedianya sarana prasana penanggulangan kebakaran. Target KSD ini telah diselesaikan oleh Disgulkarmat dengan menyusun laporan rekapitulasi sarana prasarana penanggulangan kebakaran yang tersebar di wilayah DKI Jakarta antara lain data kantor sektor/pos pemadam, hidran kota dan hidran mandiri. Data-data tersebut sudah terdapat pada Bab I LKIP ini.

4. **KSD 72-** Mitigasi dan Adaptasi Bencana Iklim

Dinas Penanggulangan Kebakaran dalam pencapaian sasaran kesiapsiagaan layanan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan didukung oleh KSD 67 (Mitigasi dan Adaptasi Bencana Iklim). Terdapat satu rencana aksi yang menjadi tanggung jawab Disgulkarmat yaitu melakukan sosialisasi penanggulangan kebakaran serta penyelamatan bahaya kebakaran dan bencana lainnya di Provinsi DKI Jakarta dengan target yang harus dilaksanakan yaitu Sosialisasi dan simulasi penanggulangan kebakaran serta penyelamatan bahaya kebakaran dan bencana lainnya di Provinsi DKI Jakarta pada tiap triwulan di Tahun 2021. Selama Tahun 2021 Disgulkarmat belum dapat melaksanakan sosialisasi seperti pada umumnya yang mengumpulkan masyarakat untuk dilakukan sosialisasi dikarenakan situasi pandemic yang belum terkendali. Sebagai alternatif sosialisasi maka dilaksanakanlah sosialisasi “woro-woro” melalui pengeras suara tempat ibadah yang berisi himbauan untuk tetap waspada terhadap potensi kebakaran dan langkah-langkah mencegah kebakaran. Pada tahun 2021 dilaksanakan sebanyak 45.876 titik sosialisasi woro-woro.

Gambar 3. 3 Sosialisasi melalui pengeras suara rumah ibadah ibadah



SASARAN 3: Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel

IKU 3: Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran

Sasaran terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel merupakan sasaran template yang digunakan untuk menaungi program penunjang urusan pemerintah daerah dengan indikator Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran dilakukan dengan mengukur 3 Komponen yaitu:

- a. Penyerapan Anggaran. Komponen ini mengukur kesesuaian realisasi anggaran dibandingkan dengan pagu anggaran yang telah ditetapkan di lingkungan Perangkat Daerah. Nilai penyerapan anggaran maksimal adalah 40%. Penyerapan anggaran bernilai 40% apabila serapan anggaran $\geq 80\%$. Apabila serapan anggaran di bawah $< 80\%$ maka perhitungan nilai penyerapan anggaran = (Persentase Serapan Anggaran x 40%).
- b. Efisiensi adalah sisa dana yang diperoleh setelah pelaksanaan dari subkegiatan yang target sarannya telah dicapai. Apabila pencapaian output tidak tercapai 100% maka unsur efisiensi tidak diukur. Sisa dana adalah selisih lebih pagu anggaran dengan realisasi anggaran dimana selisih lebih pagu dimaksud sudah tidak dialihkan kembali untuk subkegiatan/belanja lainnya.
- c. Pencapaian output adalah persentase capaian indikator kinerja subkegiatan (output). Capaian indikator kinerja subkegiatan (output). Realisasi pencapaian output dapat dilihat dalam aplikasi e-monev Anggaran.

Formulasi pengukuran adalah sebagai berikut:

1. Serapan Anggaran $\geq 80\%$

Realisasi = (40%) + (efisiensi X 10%) + (pencapaian output X 50%)

2. Serapan Anggaran $< 80\%$

Realisasi = (Penyerapan Anggaran X 40%) + (efisiensi X 10%) + (pencapaian output X 50%)

Realisasi indikator persentase kualitas pelaksanaan anggaran Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan ada Tahun 2021 mencapai 99,4%.

Rincian perolehan tersebut diperoleh berdasarkan perhitungan pada Tabel 3.4.

Tabel 3. 4 Perhitungan Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran

Kriteria	BOBOT	Realisasi	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran
Realisasi Output	50%	99%	49,7%
Realisasi Keuangan	40%	97,4%	40,0%
Realisasi Efisiensi	10%	97,2%	9,7%
TOTAL Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran			99,4%

Beberapa Program/Kegiatan/Sub Kegiatan/Kinerja lainnya yang mendukung ketercapaian IKU tersebut adalah

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi

Program ini memiliki indikator kinerja Indeks Kepuasan Pelayanan kantor dengan target 4 nilai. Indeks kepuasan pelayanan kantor didapatkan dengan melalui survey kepuasan kepada penerima layanan Kegiatan/Sub Kegiatan dibawah program ini. Survey yang dilakukan mempedomani PermenPAN-RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Survei telah dilaksanakan dengan hasil perhitungan nilai sebesar 88,34 dengan realisasi indeks kepuasan sebesar 4.

2. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kota/Kabupaten

Program ini memiliki indikator kinerja Indeks Kepuasan Pelayanan kantor dengan target 4 nilai. Indeks kepuasan pelayanan kantor didapatkan dengan melalui survey kepuasan kepada penerima layanan Kegiatan/Sub Kegiatan dibawah program ini. Survey yang dilakukan mempedomani PermenPAN-RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Survei telah dilaksanakan di Sudin Gulkarmat lima wilayah kota

administrasi dengan hasil perhitungan realisasi indeks kepuasan sebesar 4. Sehingga rata-rata Indeks kepuasan pelayanan kantor sebesar 4.

SASARAN 4: Meningkatnya pertumbuhan investasi

Persentase penyelesaian rencana aksi Reform Perizinan untuk Percepatan Ease of Doing Business (EoDB) (KSD 17)

Sasaran meningkatnya pertumbuhan investasi didukung oleh Kegiatan Strategis Daerah (KSD) -17 dimana Disgulkarmat berkontribusi pada rencana aksi Digitalisasi Rekomendasi Teknis Perangkat Daerah ke Jakevo dalam Pelayanan Perizinan dengan Target: (1) Registrasi akun perangkat daerah ke Jakevo, dan (2) 100% digitalisasi rekomendasi teknis. JAKEVO adalah aplikasi perizinan online dari Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP) DKI Jakarta, seluruh permohonan pelayanan masuk melalui DPMPSTP dan didistribusikan ke perangkat daerah teknis sesuai permohonan pelayanan. Disgulkarmat dalam hal pelayanan melaksanakan layanan rekomendasi teknis keselamatan kebakaran kepada pengelola Gedung di wilayah DKI Jakarta. Seluruh target yang ditetapkan pada KSD-17 ini berhasil dilaksanakan yaitu dengan teregistrasinya akun Disgulkarmat pada Jakevo dan juga mulai bulan maret seluruh layanan rekomendasi teknis keselamatan kebakaran dilaksanakan melalui Jakevo dalam pelayanan perizinan

SASARAN 5: Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel

Persentase penyelesaian rencana aksi Mewujudkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dengan Predikat AA (KSD 39)

Sasaran Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel didukung oleh Kegiatan Strategis Daerah (KSD) -39 Mewujudkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dengan Predikat AA dimana Disgulkarmat berkontribusi pada beberapa rencana aksi dengan beberapa target sebagaimana pada Tabel 3.5

Tabel 3. 5 Realisasi KSD 39 Tahun 2021 Disgulkarmat

Rencana Aksi	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatkan nilai pada komponen perencanaan kinerja dalam penerapan SAKIP pada Dinas Penanggulangan Kebakaran dan	1 Ditetapkannya Dokumen Kinerja (Eselon 2, 3, 4 dan Fungsional) Tahun 2021	Tersusunnya Dokumen Kinerja (Eselon 2, 3, 4 dan Fungsional) Tahun 2021	100%
	2 Disusunnya Rancangan Indikator pada Dokumen Kinerja (Eselon 2, 3, 4, Fungsional dan Pelaksana) Tahun 2022	Tersusunnya Rancangan Indikator pada Dokumen Kinerja (Eselon 2, 3, 4, Fungsional dan Pelaksana) Tahun 2022	100%

Laporan Kinerja Dinas Penanggulangan kebakaran dan Penyelamatan Tahun 2021

Rencana Aksi		Target	Realisasi	Capaian
Penyelamatan				
Meningkatkan nilai pada komponen pengukuran kinerja dalam penerapan SAKIP pada Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan	1	Evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah TW IV Tahun 2020	Tersusunnya dokumen Evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah TW IV Tahun 2020	100%
	2	Evaluasi capaian Dokumen Kinerja Eselon 2, 3, 4 dan Fungsional TW IV Tahun 2020	Tersusunnya Dokumen Evaluasi Kinerja Eselon 2, 3, 4 dan Fungsional TW IV Tahun 2020	100%
	3	Evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah TW I Tahun 2021	Tersusunnya Dokumen Evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah TW I Tahun 2021	100%
	4	Evaluasi capaian Dokumen Kinerja Eselon 2, 3, 4 dan Fungsional TW I Tahun 2021	Tersusunnya Dokumen Evaluasi Kinerja Eselon 2, 3, 4 dan Fungsional TW I Tahun 2021	100%
	5	Evaluasi Renstra Perangkat Daerah Tahun 2017-2022	Evaluasi Renstra Perangkat Daerah Tahun 2017-2022	100%
	6	Evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah TW II Tahun 2021	Tersusunnya Dokumen Evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah TW II Tahun 2021	100%
	7	Evaluasi capaian Dokumen Kinerja Eselon 2, 3, 4 dan Fungsional TW II Tahun 2021	Tersusunnya Dokumen Evaluasi capaian Dokumen Kinerja Eselon 2, 3, 4 dan Fungsional TW II Tahun 2021	100%
	8	Evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah TW III Tahun 2021	Tersusunnya Dokumen Evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah TW III Tahun 2021	100%
	9	Evaluasi capaian Dokumen Kinerja Eselon 2, 3, 4 dan Fungsional TW III Tahun 2021	Tersusunnya Dokumen Evaluasi capaian Dokumen Kinerja Eselon 2, 3, 4 dan Fungsional TW III Tahun 2021	100%
Meningkatkan nilai pada komponen pelaporan kinerja dalam penerapan SAKIP pada Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan	1	Tersusunnya LKIP Perangkat Daerah Tahun 2020	Tersusunnya LKIP Perangkat Daerah Tahun 2020	100%
	2	Terinputnya LKIP Perangkat Daerah Tahun 2020 pada aplikasi esr.menpan.go.id	Terinputnya LKIP Perangkat Daerah Tahun 2020 pada aplikasi esr.menpan.go.id pada tanggal 31 Januari Tahun 2021	100%

SASARAN 5: Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel

Persentase penyelesaian rencana aksi Peningkatan Kualitas Kinerja Pemerintahan (KSD 61)

Sasaran Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel didukung oleh Kegiatan Strategis Daerah (KSD)-61 Peningkatan Kualitas Kinerja Pemerintahan dimana Disgulkarmat berkontribusi pada beberapa rencana aksi dengan beberapa target sebagaimana pada Tabel 3.6

Tabel 3. 6 Realisasi KSD 61 Tahun 2021 Disgulkarmat

Rencana Aksi	Target	Realisasi	Capaian	
Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) pada Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan	1	Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) pada Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan pada Triwulan I Tahun 2021	Terlaksananya Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) pada Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan pada Triwulan I Tahun 2021 dengan nilai kepuasan eksternal	100%
	2	Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) pada Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan pada Triwulan II Tahun 2021	Terlaksananya Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) pada Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan pada Triwulan II Tahun 2021 dengan nilai kepuasan eksternal	100%
	3	Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) pada Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan pada Triwulan III Tahun 2021	Terlaksananya Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) pada Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan pada Triwulan III Tahun 2021 dengan nilai kepuasan eksternal	100%
	4	Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) pada Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan pada Triwulan IV Tahun 2021	Terlaksananya Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) pada Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan pada Triwulan IV Tahun 2021 dengan nilai kepuasan eksternal	100%
Tindak Lanjut Hasil Pengawasan APIP pada Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan atas LHP yang terbit periode 2019 s.d. 2021	1	TLHP APIP selesai ditindaklanjuti atas LHP yang terbit periode tahun 2019 s.d. 2021.	Adanya berita acara verifikasi inspektorat terkait TLHP APIP yang selesai ditindaklanjuti pada Semester I	100%
	2	TLHP APIP selesai ditindaklanjuti atas LHP yang terbit periode tahun 2019 s.d. 2021.	Adanya berita acara verifikasi inspektorat terkait TLHP APIP yang selesai ditindaklanjuti pada Semester II	100%

SASARAN 6: Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel serta berbasis teknologi informasi

Persentase penyelesaian rencana aksi Implementasi SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) (63)

Sasaran Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel serta berbasis teknologi informasi didukung oleh Kegiatan Strategis Daerah (KSD)-63 Implementasi SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) dimana Disgulkarmat berkontribusi pada satu rencana aksi dengan dua target sebagaimana pada Tabel 3.7

Tabel 3. 7 Realisasi KSD 63 Tahun 2021 Disgulkarmat

Rencana Aksi	Target	Realisasi	Capaian
--------------	--------	-----------	---------

Laporan Kinerja Dinas Penanggulangan kebakaran dan Penyelamatan Tahun 2021

Rencana Aksi	Target	Realisasi	Capaian	
Asesmen Transformasi Digital dan Evaluasi SPBE pada Dinas Penanggulangan Kebakaran Dan Penyelamatan	1	Data hasil isian form asesmen transformasi digital Perangkat Daerah sesuai format pada Instruksi Sekda No 122 tahun 2020 tentang percepatan pelaksanaan asesmen transformasi digital	Tersusunnya Data hasil isian form asesmen transformasi digital Perangkat Daerah sesuai format pada Instruksi Sekda No 122 tahun 2020 tentang percepatan pelaksanaan asesmen transformasi digital	100%
	2	Data hasil kuisisioner dan evaluasi SPBE Perangkat Daerah sesuai format KemenPAN RB dan DKI Jakarta	Tersusunnya Data hasil kuisisioner dan evaluasi SPBE Perangkat Daerah sesuai format KemenPAN RB dan DKI Jakarta	100%

SASARAN 7 : Terwujudnya Jakarta kota tangguh bencana

Persentase penyelesaian rencana aksi Pengelolaan pengurangan risiko bencana daerah (KSD 67)

Sasaran Terwujudnya Jakarta kota tangguh bencana didukung oleh Kegiatan Strategis Daerah (KSD)-67 Pengelolaan pengurangan risiko bencana daerah dimana Disgulkarmat berkontribusi pada satu rencana aksi, dimana pencapaiannya sudah kami jelaskan pada penjelasan Sasaran ke 2, karena KSD-67 merupakan kegiatan strategis yang mendukung pencapaian sasaran strategis ke 2.

SASARAN 8: Terbangunnya kota yang berwawasan tata ruang dan lingkungan sebagai perwujudan kota yang berkelanjutan dan lestari

Persentase penyelesaian rencana aksi Mitigasi dan Adaptasi Bencana Iklim (KSD 72)

Sasaran Terbangunnya kota yang berwawasan tata ruang dan lingkungan sebagai perwujudan kota yang berkelanjutan dan lestari (KSD)-72 Mitigasi dan Adaptasi Bencana Iklim dimana Disgulkarmat berkontribusi pada satu rencana aksi, dimana pencapaiannya sudah kami jelaskan pada penjelasan Sasaran ke 2, karena KSD-72 merupakan kegiatan strategis yang mendukung pencapaian sasaran strategis ke 2.

SASARAN 9: Pemenuhan SPM ketercapaian layanan pemadaman

Persentase layanan pemadaman dalam waktu tanggap (response time) 15 menit

Kinerja pemenuhan SPM masuk kedalam sasaran khusus yang dikehendaki dari Disgulkarmat dikarenakan belum masuknya terget Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran pada dokumen Draft Perubahan Renstra Tahun 2017-2022.

Dinas Penanggulangan merupakan salah satu perangkat daerah yang menjalankan urusan wajib bidang Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat sub urusan kebakaran yang menjalankan fungsi wajib dalam penanganan kebakaran dan penyelamatan. Indikator yang ditetapkan berdasarkan Permendagri 114 tahun 2018 tentang Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota adalah Persentase layanan pemadaman dalam waktu tanggap (response time) 15 menit yang dilakukan oleh Dinas Gulkarmat dan relawan. Pada Tahun 2021 terdapat 1535 kejadian kebakaran dengan 1532 kejadian dapat direspon dalam waktu minimal 15 menit. Sehingga capaian Disgulkarmat sebesar 99,8% merupakan capaian yang telah mendekati kondisi ideal 100% seperti halnya target SPM secara nasional. Tren capaian Persentase layanan pemadaman dalam waktu tanggap (response time) 15 menit dapat dilihat pada grafik 3.1.

SASARAN 10: Terbitnya Sertifikat Keselamatan Kebakaran

Persentase bangunan gedung diperiksa dan mendapatkan rekomendasi teknis

Indikator kinerja persentase bangunan gedung diperiksa dan mendapat rekomendasi teknis merupakan indikator sasaran khusus yang dikehendaki, dengan penjelasan bahwa gedung yang mendapatkan rekomendasi teknis keselamatan kebakarannya merupakan gedung yang berada di koridor utama utama yaitu Jalan Jendral Sudirman, Jalan Gatot Soebroto dan Jalan Rasuna Said. Realisasi yang dicapai pada indicator kinerja ini adalah sebagai berikut:

- a. Gedung di koridor Jalan Sudirman dengan target sebanyak 68 gedung, keseluruhannya telah mendapatkan rekomendasi keselamatan kebakarannya sehingga capaiannya 100%.
- b. Gedung di koridor Jalan Gatot Soebroto dengan target sebanyak 49 gedung, keseluruhannya telah mendapatkan rekomendasi keselamatan kebakarannya sehingga capaiannya 100%
- c. Gedung di koridor Jalan Rasuna Said dengan target sebanyak 58 gedung, keseluruhannya telah mendapatkan rekomendasi keselamatan kebakarannya sehingga capaiannya 100%

SASARAN 11: Meningkatkan Pemanfaatan E-Purchasing dalam Pengadaan Barang dan Jasa

Persentase Pemanfaatan E-Order

Target pemanfaatan e-order merupakan target dimana belanja makan minum rapat dan makan minum lapangan wajib dilaksanakan menggunakan e-order dimana pada pemesanan makan minum tersebut diwajibkan kepada UMKM penyedia makanan/minuman. Untuk target pemanfaatan e-order, Disgulkarmat merupakan salah satu perangkat daerah yang mendapatkan pengecualian untuk wajib menggunakan e-order, dikarenakan penyediaan makan-minum lapangan Disgulkarmat merupakan kegiatan tidak terprediksi dan sewaktu-waktu Ketika terjadi kebakaran, sehingga tidak ada penyedia UMKM yang dapat menyanggupi persyaratan Disgulkarmat. Oleh karena itu capaian Disgulkarmat tetap 100%.

SASARAN 12: Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel

Opini laporan keuangan daerah

Target indicator sasaran ini merupakan Opini Laporan keuangan daerah mendapatkan predikat WTP (Wajar Tanpa Pengecualian). Untuk mendukung pencapaian WTP maka perangkat daerah berkontribusi dengan menyusun laporan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel. Penanggung jawab utama terhadap pencapaian WTP ada pada Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD)

SASARAN 13: Terimplementasinya rencana strategis komunikasi publik untuk program-program umum dan unggulan Perangkat Daerah

Persentase implementasi rencana strategi komunikasi publik program-program umum dan unggulan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Indikator Persentase implementasi rencana strategi komunikasi publik program-program umum dan unggulan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan teknis perhitungan.

- a. Persentase tersusunnya strategi komunikasi program unggulan dan program umum Perangkat Daerah
- b. Persentase tersusunnya editorial plan program unggulan Perangkat Daerah. Diskominfotik menyusun editorial plan di level Provinsi
- c. Persentase tersusunnya daftar potensi krisis dan implementasi protokol krisis oleh Perangkat Daerah sesuai SOP yang disusun Diskominfotik

d. Persentase terpublikasinya materi komunikasi program unggulan dan program umum Perangkat Daerah melalui media masa atau media sosial atau media luar ruang.

Capaian indikator implementasi rencana strategi komunikasi yang dilakukan oleh Disgulkarmat sebesar 100% dimana program yang dibuatkan strategi komunikasinya yaitu Sosialisasi peraturan peran serta masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran dan sosialisasi hasil pendataan dasawisma melalui aplikasi CARIK tentang rumah rawan kebakaran hingga penempelan stiker rumah rawan kebakaran.

SASARAN 14: Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel

Predikat SAKIP Perangkat Daerah

Predikat SAKIP diperoleh dengan adanya penilaian yang dilakukan oleh inspektorat terhadap pelaksanaan akuntabilitas kinerja perangkat daerah. Dalam penilaiannya tersebut perangkat daerah diminta untuk melengkapi beberapa kebutuhan dokumen pemeriksaan termasuk Dokumen LKIP Tahun 2020. Pada Tahun 2021 Disgulkarmat memperoleh nilai predikat AKIP sebesar 93,48 jauh melebihi target yaitu 81, sehingga capaian Disgulkarmat pada kinerja ini sebesar 115%.

SASARAN 15: Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan serta peningkatan produktivitas dan integritas aparatur

Nilai PMP RB Perangkat Daerah

Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang selanjutnya disingkat PMPRB adalah model penilaian mandiri yang berbasis prinsip *Total Quality Management* dan digunakan sebagai metode untuk melakukan penilaian serta analisis yang menyeluruh terhadap kinerja instansi pemerintah. Nilai PMPRB diperoleh setelah perangkat daerah menginput Lembar Kerja Evaluasi yang telah

disiapkan oleh inspektorat dan mengupload bukti dukungannya. Realisasi nilai PMPRB yang diperoleh Disgulkarmat sebesar 88,37 dari target 91 dengan capaian 94%

SASARAN 16: terselesaikannya Tindak Lanjut Arahan Gubernur

Persentase capaian penyelesaian Tindak Lanjut Arahan Gubernur

Tindak lanjut arahan gubernur adalah kinerja dimana perangkat daerah diperlukan cepat untuk melaksanakan arahan gubernur sesuai dengan permasalahan yang diinginkan. Pada tahun 2021 terdapat dua tindak lanjut arahan gubernur yang menjadi tanggung jawab Disgulkarmat yaitu:

- a. Dinas Gulkarmat lakukan distribusi wilayah secara terencana seperti sebelumnya, sehingga seluruh sumber daya bisa digunakan untuk penanganan banjir, apabila terjadi peningkatan permukaan air. Arahan ini masuk di tanggal 23 September 2021.
- b. Dinas Gulkarmat siapkan SOP untuk penanganan banjir bagi sumber daya Gulkarmat. Arahan ini masuk di tanggal 9 September 2021.

Dua arahan gubernur tersebut seluruhnya sudah ditindak lanjuti oleh Disgulkarmat dengan kesiapsiagaan petugas dan sarana prasarana penanganan banjir dan juga dengan penyusunan SOP penanganan banjir bagi Disgulkarmat.

SASARAN 17: Meningkatnya penyelesaian pengaduan masyarakat

Persentase capaian penyelesaian pengaduan masyarakat

Warga DKI Jakarta dapat melakukan aduan langsung terhadap permasalahan yang ditemui dilingkungannya untuk segera diperbaiki dan dilakukan penanganan oleh perangkat daerah yang membidangi permasalahan tersebut melalui aplikasi *Citizen Relations Management* (CRM). Sistem Cepat Respon Masyarakat merupakan wujud inovasi dalam penyelesaian segala masalah non-darurat di Jakarta. Dalam menangani laporan, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dituntut untuk memprioritaskan semua pengaduan, baik yang bobotnya besar maupun kecil. Saat ini, penanganan aduan warga melalui sistem Cepat Respon Masyarakat sudah daring, tiap OPD bisa berkoordinasi dengan OPD lainnya dalam waktu singkat dan laporan masyarakat bisa langsung ditangani melalui aplikasi CRM baik yang berbasis aplikasi web dan aplikasi mobile.

Selama Tahun 2021 jumlah aduan yang masuk ke Dinas Gulkarmat sebanyak 265 laporan dengan 264 laporan dapat diselesaikan sesuai dengan waktu tenggat

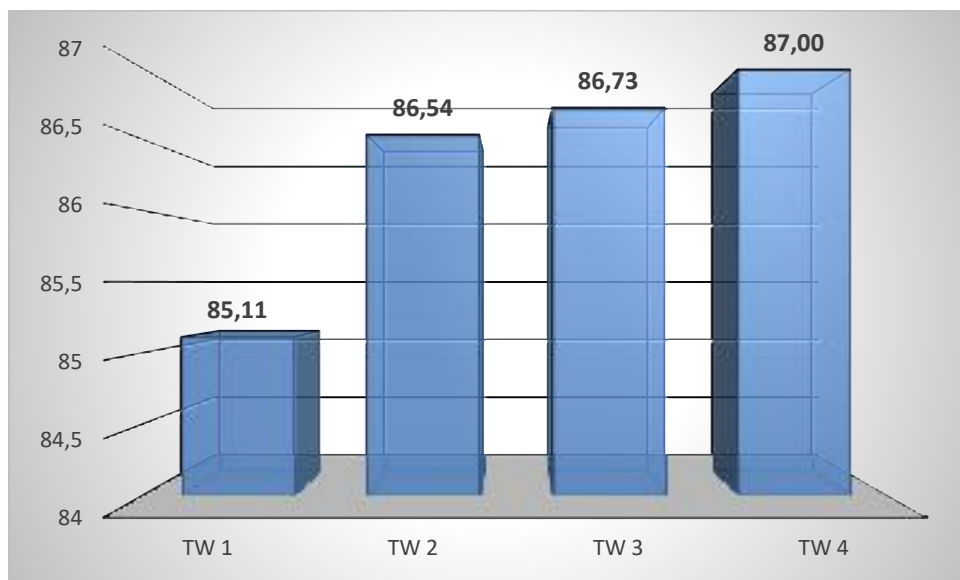
yang diharapkan dan 1 laporan yang juga dapat diselesaikan, namun karena informasi masuk ke dashboard pada pukul 23.45 sehingga waktu penyelesaian terjadi di hari berikutnya. Secara total capaian penyelesaian pengaduan masyarakat kepada Disgulkarmat sebesar 99,67%.

SASARAN 18: Meningkatnya kualitas layanan kepada masyarakat

Survei Kepuasan Masyarakat

Survey kepuasan masyarakat merupakan amanat PermenPAN-RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik yang minimal dilaksanakan satu kali dalam satu tahun. Dinas Gulkarmat selaku unit penyelenggara pelayanan publik melaksanakan survey kepuasan masyarakat sebanyak empat kali dalam satu tahun dengan periode tiga bulanan. Hasil survey kepuasan masyarakat terhadap layanan Disgulkarmat per triwulan adalah sebagaimana Gambar 3.4

Gambar 3. 4 Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Disgulkarmat Tahun 2021 Triwulan 1-4



Sumber: Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan, 2022

Secara keseluruhan hasil survey kepuasan masyarakat terhadap layanan Disgulkarmat menunjukkan tren positif dengan adanya peningkatan dari triwulan ke triwulan selanjutnya. Rata-rata nilai kepuasan dalam satu tahun yaitu 86,35. Target yang ditetapkan oleh Provinsi DKI Jakarta untuk masing-masing perangkat daerah adalah 86. Sehingga capaian Disgulkarmat adalah 100%.

SASARAN 19: Meningkatkan penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)

Persentase progress penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)

Indikator Persentase progress penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK) diperoleh dengan Jumlah rekomendasi LHP BPK RI Tahun 2005 dan seterusnya yang telah diselesaikan oleh Perangkat Daerah dan UKPD dibawah koordinasinya dibagi jumlah seluruh rekomendasi LHP BPK RI yang diterima Tahun 2005 dan seterusnya dikali 100%. Realisasi Digulkarmat pada kinerja ini adalah 100% keseluruhan TLHP BPK telah selesai ditindaklanjuti

3.1.3. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2021 dan Tahun sebelumnya

Hasil pengukuran indikator kinerja terhadap target dan realisasi tahun 2021 serta realisasi tahun sebelumnya diperoleh data pada tabel 3.3 sebagai berikut

Tabel 3. 8 Capaian Kinerja Tahun 2018-2021

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Indikator Kinerja											
				2018			2019			2020			2021		
				T	R	Capaian (%)	T	R	Capaian (%)	T	R	Capaian (%)	T	R	Capaian (%)
1	Terwujudnya Jakarta Kota Tangguh Bencana	Indeks Kesiapsiagaan Pelayanan Kebencanaan Daerah (komposit damkar)	indeks	1,36	1,3	96%	1,7	1,6	94%	2,23	1,7	76%	N/A	2,07	N/A
2	Menurunnya RW rawan kebakaran	Jumlah RW rawan kebakaran	buah	156	172	36%	131	172	69%	106	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
3	Meningkatnya kesiapsiagaan terhadap ancaman kebakaran	Tingkat kesiapsiagaan terhadap ancaman kebakaran	indeks	5.2	5.19	100%	5,9	5,79	98%	6,59	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
4	Menurunnya rata-rata jumlah bangunan perumahan yang terbakar pada kejadian kebakaran di kawasan permukiman	Rata-rata jumlah bangunan yang terbakar tiap kejadian kebakaran di kawasan permukiman	bangunan	3.04	2.25	126%	2,95	2,91	101%	2,86	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
5	Meningkatnya pelayanan operasi penyelamatan	Waktu rata-rata operasi penyelamatan	menit	120	107	112%	110	93	118%	100	95	105%	N/A	N/A	N/A
6	Meningkatnya jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran (SPM)	Persentase jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran (SPM)	persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	N/A	N/A	N/A

Laporan Kinerja Dinas Penanggulangan kebakaran dan Penyelamatan Tahun 2021

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Indikator Kinerja											
				2018			2019			2020			2021		
				T	R	Capaian (%)	T	R	Capaian (%)	T	R	Capaian (%)	T	R	Capaian (%)
7	Meningkatnya maturitas pengendalian internal Dinas	Tingkat Maturitas Dinas	indeks	3,1	3,06	99%	3,2	3,06	96%	3,3	3,06	93%	N/A	N/A	N/A
8	Mewujudkan kota aman dari bahaya kebakaran dan bencana lainnya	Rata-rata jumlah jiwa terdampak tiap kejadian kebakaran	jiwa/kejadian	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	7,3	5,62	123,0%
9	Terwujudnya peningkatan kesiapsiagaan pelayanan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan	Tingkat kesiapsiagaan pelayanan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan	skor	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	5,8	5,97	102,93%
10	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran	%	100	89,39	89%	100	93,79	93,8%	100	99,8	99,8%	91	99,40	109,23%

Tabel 3.3 merupakan rekapitulasi target dan realisasi seluruh IKU baik yang ada di Renstra 2017-2022 dan pada Dokumen Draft Perubahan Renstra Tahun 2017-2022. Penyusunan perjanjian kinerja perangkat daerah pada tahun 2018-2020 belum mengikuti cascading kinerja yang seharusnya, oleh karena itu terjadi perubahan perkin perangkat daerah dari tahun ke tahun. Perbedaan tersebut dikarenakan kebijakan yang diambil oleh Provinsi DKI Jakarta pada saat penyusunan perkin perangkat daerah. Selain itu belum matangnya konsep cascading kinerja pada saat penyusunan Renstra 2017-2022 menyebabkan belum jelasnya beban kinerja kepala perangkat daerah hingga jabatan eselon 3 dan 4 dibawahnya. Mengingat beberapa perubahan tersebut Disgulkarmat tetap menghitung kinerja sasaran Renstra 2017-2022 yang telah ditetapkan. Semenjak tahun 2021 IKU perangkat daerah bersumber dari Draft Dokumen Perubahan Renstra 2017-2022.

3.2 Realisasi Anggaran Tahun 2021

Program yang menunjang Bidang Kebakaran yang merupakan Urusan Wajib ada 3 (tiga) program yaitu sebagai berikut:

1. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran
2. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi
3. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kota/Kabupaten

Program, kegiatan dan sub kegiatan pada tahun 2021 telah mengikuti Draft Dokumen Perubahan Renstra 2017-2022 yang merujuk pada Permendagri 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang telah dimutakhirkan dengan Kepmendagri nomor 050-

Laporan Kinerja Dinas Penanggulangan kebakaran dan Penyelamatan Tahun 2021

3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan pada tahun 2021 memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp 1.023.831.335.373,- yang terbagi menjadi dua yaitu anggaran Belanja Pegawai yaitu anggaran yang digunakan untuk membayarkan gaji dan tunjangan pegawai sebesar Rp 698.785.584.052,- dengan realisasi penyerapan sebesar 98,86% dan anggaran Belanja Program yaitu anggaran yang digunakan untuk melaksanakan program yang ditargetkan sebesar Rp. 325.045.751.321,- dengan persen realisasi penyerapan sebesar 94,31%. Secara keseluruhan realisasi penyerapan anggaran tahun 2021 mencapai 97,42%.

Tabel 3. 9 Perbandingan Pencapaian Indikator Kinerja dengan Realisasi Anggaran tahun 2021

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Program Pendukung	APBD	APBD-P	Realisasi	(%)
1	Mewujudkan kota aman dari bahaya kebakaran dan bencana lainnya	Rata-rata jumlah jiwa terdampak tiap kejadian kebakaran	123,01%	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	271.090.958.810	240.726.853.820	232.899.783.342	96,7%
2	Terwujudnya peningkatan kesiapsiagaan pelayanan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan	Tingkat kesiapsiagaan pelayanan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan	102,93%					
3	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran	109,23%	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	825.537.630.612	762.595.136.621	745.647.061.011	97,8%
				Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kota/Kabupaten	27.215.842.296	20.509.344.932	18.827.768.829	91,8%
RATA-RATA			111,73%	TOTAL	1.123.844.431.718	1.023.831.335.373	997.374.613.182	97,4%

Pencapaian Sasaran strategis Mewujudkan kota aman dari bahaya kebakaran dan bencana lainnya dan sasaran strategis Terwujudnya peningkatan kesiapsiagaan pelayanan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan yang merupakan tujuan dan sasaran perangkat daerah yang didukung oleh satu program yaitu Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran dengan alokasi anggaran sebesar Rp 240.726.853.820,- dengan persen realisasi mencapai 96,7% sedangkan capaian sarasannya mencapai 123 %.

Pencapaian Sasaran ke-3 Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel didukung oleh 2 program yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi dengan alokasi anggaran sebesar Rp 762.595.136.621,- dengan persen realisasi mencapai 97,8% dan Program Program Urusan Pemerintah Daerah Kota/Kabupaten dengan alokasi anggaran sebesar Rp

Laporan Kinerja Dinas Penanggulangan kebakaran dan Penyelamatan Tahun 2021

20.509.344.932,- dengan persen realisasi mencapai 91,8% sedangkan capaian sasaran tersebut mencapai 109%.

3.3 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Tahun 2021

Sebelum kita membahas efisiensi sumber daya tahun 2021, maka kita harus tinjau perjalanan sinkronisasi antara anggaran dan kinerja dimasa pandemi. Anggaran belanja langsung yang ditujukan untuk pencapaian sasaran/program pada penetapan APBD tahun 2021 sebesar Rp 1.123.844.431.718,- dengan 3 sasaran yang akan dicapai sebagaimana Tabel 3.7

Tabel 3. 10 Perbandingan Anggaran pada APBD TA 2021 dengan APBD-P TA 2021

No	Sasaran Strategis	Program Pendukung	Anggaran Penetapan	Anggaran APBD-P 2021	Jumlah pengurangan	% Pengurangan Anggaran
1	Mewujudkan kota aman dari bahaya kebakaran dan bencana lainnya	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	271.090.958.810	240.726.853.820	30.364.104.990	11%
2	Terwujudnya peningkatan kesiapsiagaan pelayanan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan					
3	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	825.537.630.612	762.595.136.621	62.942.493.991	8%
		Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kota/Kabupaten	27.215.842.296	20.509.344.932	6.706.497.364	25%
		TOTAL	1.123.844.431.718	1.023.831.335.373	100.013.096.345	9%

Tabel 3. 11 Efisiensi Realisasi Anggaran Terhadap Pencapaian IKU

No	Sasaran	IKU	Capaian Kinerja 2021			Anggaran Penetapan APBD 2021	Anggaran pada APBD-P 2021			Pengurangan Anggaran dari APBD ke APBD-P 2020	Jumlah efisiensi
			Target	Realisasi	Capaian (R/T)	Target	Target	Realisasi	Capaian (R/T)		
1	Mewujudkan kota aman dari bahaya kebakaran dan bencana lainnya	Rata-rata jumlah jiwa terdampak tiap kejadian kebakaran	7,3	5,62	123,0%	157.171.463.206	133.421.064.719	126.991.437.681	95,18%	23.750.398.487	6.429.627.038
2	Terwujudnya peningkatan kesiapsiagaan pelayanan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan	Tingkat kesiapsiagaan pelayanan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan	5,8	5,97	102,93%	113.919.495.604	107.305.789.101	105.908.345.661	98,70%	6.613.706.503	1.397.443.440
3	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran	91	99,4	109,23%	852.753.472.908	783.104.481.553	764.474.829.840	97,62%	69.648.991.355	18.629.651.713
TOTAL					111,73%	1.123.844.431.718	1.023.831.335.373	997.374.613.182	97,42%	100.013.096.345	26.456.722.191

Awal tahun 2021 pandemi covid-19 masih terjadi yang mengakibatkan kontraksi ekonomi, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih melaksanakan refocusing anggaran untuk penanganan covid-19. Oleh karena itu terjadilah pengurangan anggaran yang cukup signifikan sebesar Rp 100.013.096.345,- pada anggaran perubahan Tahun 2021. Namun dengan adanya pengurangan anggaran tersebut, pemerintah Provinsi DKI Jakarta memutuskan untuk tidak merubah kinerja tahun 2021. Pada tabel 3.7 diketahui bahwa pengurangan anggaran dengan nilai terbesar terjadi pada Program Penunjang Urusan Pemerintah Provinsi yang ditujukan untuk mencapai sasaran Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel dengan pengurangan anggaran sebesar Rp 62.942.493.991,-.

Tabel 3. 12 Analisis Penggunaan Sumber Daya

Kondisi Ideal	Kondisi Saat Ini	Kekurangan/Kelebihan	Tindak Lanjut
Anggaran yang diperlukan untuk mencapai target kinerja 3 sasaran Rp 1.123.844.431.718,-	Anggaran yang disediakan untuk mencapai target kinerja sasaran yang sama Rp 1.023.831.335.373,-	Pengurangan anggaran sebesar Rp 100.013.096.345,- setara dengan 9% dari anggaran awal.	Melakukan pelaksanaan kegiatan untuk mencapai sasaran dengan melakukan inovasi sehingga meminimalisir penggunaan anggaran. Sehingga secara keseluruhan capaian indikator sasaran 102,54%

Dalam pembahasan efisiensi akan dibandingkan antara capaian kinerja sasaran dengan capaian serapan anggaran. Dimana sisa anggaran disebut sebagai efisiensi jika target kinerjanya mencapai 100% atau mendekati. Pada tabel 3.8 diketahui bahwa sasaran ke 1, 2 dan 3 memiliki capaian yg melebihi 100% sehingga sisa anggaran pada program yang menunjang sasaran tersebut dikatakan sebagai efisiensi. Pada tabel 3.9 dijelaskan bahwa secara keseluruhan terdapat pengurangan anggaran sebesar 9% sementara target kinerja tetap dan dapat dijalankan dengan capaian kinerja 11,73%. sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh sisa anggaran sebesar 26.456.722.191 dapat dikatakan sebagai efisiensi karena kinerja dapat tercapai.

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan urusan wajib bidang kebakaran pada tahun 2021 sebagai bahan pengambilan keputusan dalam perencanaan tahun berikutnya. Dalam rencana kinerja tahun 2020 yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja ditetapkan sebanyak 3 (tiga) sasaran strategis. Secara umum capaian sasaran strategis tersebut telah menunjukkan tingkat capaian yang Sangat Tinggi dengan capaian rata-rata sasaran strategis mencapai 11,73%.

Ditengah pandemi covid-19 seluruh anggaran dilakukan refocusing dalam rangka penanganan covid-19, hal tersebut menyebabkan anggaran Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta mengalami pengurangan sebesar 9% untuk menyelesaikan target indikator kinerja utama di tahun 2021 yang sama dengan penetapan awal. Dengan pengurangan anggaran tersebut Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan mampu mencapai target indikator kinerja rata-rata sebesar 102%. Oleh karena itu seluruh sisa anggaran pada tahun 2021 dapat dikatakan sebagai efisiensi.

Secara keseluruhan tugas fungsi Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta dapat dilaksanakan dengan baik dengan beberapa prestasi diantaranya, mempertahankan penurunan frekuensi kebakaran dengan jumlah frekuensi kebakaran di Tahun 2021 sebanyak 1535 kejadian. Selain itu dalam menghadapi berbagai kendala pelaksanaan kegiatan yang dibatasi oleh anggaran dan juga dilarangnya proses berkumpul dengan masyarakat, maka muncullah inovasi-inovasi pelaksanaan kegiatan yang berkolaborasi dengan masyarakat pada proses sosialisasi pencegahan dan penanggulangan kebakaran yang dilakukan melalui pengeras suara tempat ibadah dan hal tersebut berjalan pada 45.876 titik di seluruh DKI Jakarta.

Penyusunan rencana kinerja Tahun 2021 telah mengikuti Draft Perubahan Renstra Tahun 2017-2022 walaupun secara keabsahan Perubahan Renstra belum memiliki dasar hukum karena usulan Perubahan RPJMD Tahun 2017-2022 belum disahkan.

4.2 Saran

Berdasarkan hasil penilaian terhadap capaian kinerja Renstra Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Tahun 2021, diperlukan beberapa

langkah tindak lanjut ke depan untuk meningkatkan dan mempertahankan capaian kinerja, antara lain:

- a) Penetapan perjanjian kinerja perangkat daerah sebaiknya mempedomani dokumen perencanaan yang sah sehingga tidak terjadi kebingungan dasar kinerja yang harus dicapai;
- b) Diperlukan kebijakan yang konsisten di semua lini baik perencanaan kinerja dan perencanaan anggaran sehingga tidak terjadi kesalahan dalam pengambilan kesimpulan terhadap capaian kinerja maupun efisiensi anggaran.
- c) Diperlukan konsistensi dalam penyusunan perjanjian kinerja setiap tahunnya yang berdasarkan Renstra sehingga dapat dilihat perkembangan dari setiap target kinerja utama dari tahun ke tahun.
- d) Meningkatkan sinergitas, koordinasi, komunikasi dan kerjasama baik internal Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan maupun dengan stakeholder dalam mencapai target sasaran dan program;
- e) Melakukan Evaluasi berkala guna mengoptimalkan fungsi pengendalian tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan untuk memastikan pencapaian sesuai target;

4.3 Tindak Lanjut

Kami menyadari bahwa kinerja Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan ini masih belum sempurna, untuk itu kedepannya akan disusun Renstra sesuai dengan regulasi yang telah ada sehingga cascading kinerja yang bermula dari kinerja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta hingga kinerja Perangkat Daerah termasuk Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan berikut jajaran Pejabat Eselon didalamnya dapat dilaksanakan dengan lebih terarah.

Laporan Kinerja ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada seluruh pihak yang terkait, sehingga dapat meningkatkan kinerja pada periode berikutnya. Rekomendasi diatas diharapkan mendukung kebijakan terutama dalam penyusunan perencanaan kinerja yang bersifat lebih elaboratif dan operasional untuk pencapaian tujuan menjadikan Kota Jakarta yang aman.



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2021**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SATRIADI GUNAWAN

Jabatan : Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : ANIES RASYID BASWEDAN, Ph.D

Jabatan : Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta

selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta,

2021

PIHAK KEDUA,

PIHAK PERTAMA,

Gubernur
Daerah Khusus Ibukota Jakarta,

Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran
dan Penyelamatan Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,

ANIES RASYID BASWEDAN, Ph.D

SATRIADI GUNAWAN
NIK 197111181991011001

PERJANJIAN KINERJA KEPALA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

Nama : Satriadi Gunawan
 NIP : 197111151991011001
 Jabatan : Kepala Dinas
 Unit Kerja : Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan

NO	Sasaran	NO	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan	
						I	II	III	IV			
Sasaran Strategis												
1	Mewujudkan kota aman dari bahaya kebakaran dan bencana lainnya	-	Tata rta jumlah tawar dan cek terp. kejadian kebakaran	e-SAKIP	Jumlah tawar terlampas kebakaran dibagi jumlah kejadian kebakaran	12	10	2,5	7,3	7,3	Jawab	
2	Tercapainya peningkatan kesiapsiagaan pelayanan pemadam dengan kebakaran dan penyelamatan	1	Tingkat kesiapsiagaan pelayanan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan	e-SAKIP	Tingkat kesiapsiagaan pelayanan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan meliputi: (1) kesiapsiagaan aparatur (Bobot 50%), dengan peng. persentase rata-rata kompetensi petugas berdasarkan Diklat Damkar 1, Diklat Fire Rescue, dan Diklat MFR (2) kesiapsiagaan sarana (Bobot 20%), dengan meng. k. kon. persentase mobil pompa dalam kondisi baik; (3) kesiapsiagaan prasarana (Bobot 15%), dengan peng. ukuran persentase Kelurahan yang memiliki post/skolor pemadam; (4) kesiapsiagaan masyarakat (Bobot 15%), dengan peng. ukuran persentase RW yang telah melaksanakan sosialisasi pencegahan dan penanggulangan kebakaran. Cara perhitungan: $(50\% \times \text{kesiapsiagaan aparatur}) + (20\% \times \text{kesiapsiagaan sarana}) + (15\% \times \text{kesiapsiagaan prasarana}) + (15\% \times \text{kesiapsiagaan masyarakat})$ dibagi 10		WA	WA	WA	5,5	5,5	okor

1	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel	1	Penerbitan Kualitas Pelaksanaan Anggaran	e-SAKIP	<p>Penyusunan Kualitas Pelaksanaan Anggaran diukur dengan mengukur 3 komponen yaitu:</p> <p>a. Penyerapan Anggaran. Komponen ini mengukur kesesuaian realisasi anggaran dibandingkan dengan pagu anggaran yang telah ditetapkan di lingkungan Perangkat Daerah. Nilai penyerapan anggaran maksimal adalah 100%. Penyerapan anggaran bernilai 40% apabila serapan anggaran > 80%. Apabila serapan anggaran di bawah < 80% maka perhitungan nilai penyerapan anggaran = (Persentase Serapan Anggaran x 40%). Anggaran yang diperhitungkan meliputi APBD dan BLU, dan tidak termasuk dana transfer dari pemerintah pusat.</p> <p>b. Efisiensi adalah nilai yang diperoleh setelah pelaksanaan dari subkegiatan yang target sasaran nya telah dicapai. Apabila pencapaian output tidak mencapai 100% maka unsur efisiensi tidak diukur. Jika dana adalah salah satu pagu anggaran dengan realisasi anggaran dimana salah satu pagu dimaksud sudah tidak dihabiskan kembali untuk subkegiatan/bolanya lainnya.</p> <p>c. Pencapaian output adalah persentase capaian indikator kinerja subkegiatan (output). Realisasi pencapaian output dapat dilihat dalam aplikasi e-monev Anggaran hasil output PKD, KPD</p> <p>Formulasi pengukuhan adalah sebagai berikut:</p> <p>1. Serapan Anggaran > 80% dan output > 100% Realisasi = (40%) + (Efisiensi x 10%) + (60%)</p> <p>2. Serapan Anggaran < 80% dan output < 100% Realisasi = (Penyerapan Anggaran x 40%) + (pencapaian output x 60%)</p> <p>3. Serapan Anggaran > 80%, namun output < 100% Realisasi = (40%) + (pencapaian output x 60%)</p>	NA	NA	NA	91%	91%	Persen
4	Meringkanya pertumbuhan investasi	1	Penerbitan penyelesaian rencana aksi Pelaksanaan Reformasi Perizinan untuk Pemoptimalan Ease of Doing Business (e-DB), nomor (17)	e-Monev GSD	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Pelaksanaan Reformasi Perizinan untuk Pemoptimalan Ease of Doing Business (e-DB) Nomor (17)	100%	100%	NA	NA	100%	Persentase
5	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel	1	Penerbitan penyelesaian rencana aksi Mewujudkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dengan Pedoman Nomor (39)	e-Monev KSD	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Mewujudkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dengan Pedoman Nomor (39)	100%	100%	100%	100%	100%	Persentase
		2	Penerbitan penyelesaian rencana aksi Peningkatan Kualitas Kinerja Pemerintahan nomor (61)	e-Monev KSC	Realisasi rencana aksi KSC mengenai Peningkatan Kualitas Kinerja Pemerintahan Nomor (61)	100%	100%	100%	100%	100%	Persentase

5	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang transparan akuntabel serta berbasis teknologi informasi	1	Persentase penyelesaian rencana aksi Implementasi SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) nomor (63)	e-Monev KSD	Realisasi penyelesaian dibanding target penyelesaian rencana aksi Implementasi SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) Nomor(63)	100%	NA	100%	NA	100%	Persentase
7	Terwujudnya Jawa Barat yang unggul bencana	1	Persentase penyelesaian rencana aksi Pengukuhan Pengurangan Risiko Bencana Daerah (67)	e-Monev KSD	Realisasi rencana aksi KSD mengenai Pengukuhan Pengurangan Risiko Bencana Daerah (67)	NA	NA	100%	100%	100%	Persentase
5	Terwujudnya kota yang berwawasan tata ruang dan lingkungan sebagai perwujudan kota yang berkelanjutan dan lestari	1	Persentase penyelesaian rencana aksi Mitigasi dan Adaptasi Bencana Iklim nomor(72)	e-Monev KSD	Realisasi rencana aksi KSD mengenai Mitigasi dan Adaptasi Bencana Iklim Nomor(72)	100%	100%	100%	100%	100%	Persentase
Sasaran Khusus											
9	Pemenuhan SPM ketercapaian layanan pemerintahan	1	Persentase layanan pemenuhan dalam waktu tanggap (response time) 15 menit	e-Kinerja	Jumlah Keadaan Kecelakaan yang memenuhi target response time / jumlah kejadian kebakaran * 100%	97	97	97	97	97	Persentase
10	Sertifikat Keselamatan Kebakaran	1	Persentase bangunan gedung berisiko dan mendapatkan informasi teknis	e-Kinerja	Gedung-gedung di wilayah diwilayah yang mendapatkan rekomendasi teknis / jumlah gedung asetating di wilayah * 100%	100%	100%	100%	100%	100%	Persentase
11	Meningkatkan Pemanfaatan E-Purchasing dalam Pengadaan Barang dan Jasa	1	Persentase Pemanfaatan E-Order	e-Kinerja	Jumlah rupiah realisasi Belanja Makanan dan Minuman yang menggunakan e-order dibagi Jumlah anggaran Belanja Makanan dan Minuman x 100% Rumus perhitungan menggunakan tipe Absolut	100%	100%	100%	100%	100%	Persentase
12	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel	1	Can laporan keuangan daerah	e-Kinerja	Ternyata profesional badan pemeriksa keuangan RI mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan daerah Pemprov DKI Jakarta sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan, keandalan sistem pencatatan internal, kepatuhan terhadap perundangan dan peraturan perundangan (konversi nilai opini pemeriksaan LK: WTP=3(100%), WCP=2(75%), TW=1(50%), TM=0(25%))	NA	3	NA	NA	3	WTF

13	Terwujudnya rencana strategi komunikasi publik untuk program-program umum dan unggulan Perangkat Daerah		Persentase implementasi rencana strategi komunikasi publik program-program umum dan unggulan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.	e-Kinerja	<p>a) Persentase tersusunnya strategi komunikasi program unggulan atau program umum Perangkat Daerah.</p> <p>b) Persentase tersusunnya editorial plan program unggulan atau program umum Perangkat Daerah. Diskominifok menyusun editorial plan di level Provinsi.</p> <p>c) Persentase tersusunnya daftar kontak krisis dan implementasi protokol krisis oleh Perangkat Daerah sesuai SOP yang disusun Diskominifok.</p> <p>d) Persentase terpublikasinya materi komunikasi program unggulan dan program umum Perangkat Daerah melalui media massa atau media sosial atau media luar ruang.</p> <p>Perhitungan :</p> <p>a) Bobot 30% : PD menyusun paparan strategi komunikasi program unggulan atau program umum per triwulan.</p> <p>b) Bobot 20% : PD menyusun paparan editorial plan program unggulan atau program umum per triwulan.</p> <p>c) Bobot 20% : PD menyusun paparan list kontak krisis dan implementasi protokol krisis program umum atau program unggulan per triwulan.</p> <p>d) Bobot 30% : PD mempublikasikan materi program unggulan dan program umum melalui media massa atau media sosial atau media luar ruang per triwulan (note: realisasi editorial plan, min 15 materi per triwulan).</p>	100%	100%	100%	100%	100%	Persentase
14	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel	1	Pradikal GAK P Perangkat Daerah Tahun 2021	e-Kinerja	Nilai Pradikal GAK P diperoleh dari hasil evaluasi implementasi SAOP Perangkat Daerah oleh Inspektorat (Nilai 81).	NA	NA	NA	A (51)	A (51)	Nilai
15	Mewujudkan tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan serta peningkatan produktivitas dan integritas aparatur	1	Nilai FMFR Perangkat Daerah	e-Kinerja	<p>Evaluasi: Penerapan Mera, Pengujiyanaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Rencana Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi maka Terbitir Mandir Pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang selanjutnya di gantikan PMP-Rid adalah model penilaian mandiri yang berbasis prinsip Total Quality Management dan digunakan sebagai metode untuk melakukan penilaian secara online yang menyeluruh terhadap kinerja instansi pemerintah.</p> <p>Cara penghitungan:</p> <p>Nilai FMFR = Nilai Komponen Pengungkit (bobot maks 50) + Nilai Komponen Hasil (bobot maks 40).</p> <p>Terbitir Mandir Pelaksanaan Reformasi Birokrasi diklasifikasikan oleh Inspektorat daigar kategori portofolio sebagai berikut:</p> <p>AA = >90-100;</p> <p>A = >80-90;</p> <p>BB = >70-80;</p> <p>B = >60-70;</p> <p>CC = >50-60;</p> <p>C = >40-50;</p> <p>D = 0-30</p>	NA	NA	NA	92%	92%	Persentase

Sasaran Operasional											
16	Tercepatkannya Indeks Lanjut Arhan Gubernur	1	Persentase capaian penyelesaian Indeks Lanjut Arhan Gubernur	e-Kinerja	Jumlah Realisasi TL Arhan Gubernur (termasuk e-office, arhan melalui media wa/whatsapp, dan bentuk arhan lainnya) dibagi Jumlah TL Arhan Gubernur dikali 100%	100%	100%	100%	100%	100%	Persemanan
17	Meningkatnya penyelesaian pengaduan masyarakat	1	Persentase capaian penyelesaian pengaduan masyarakat	CRK	Jumlah Realisasi Aduan Masyarakat dibagi Jumlah TL Aduan Masyarakat dikali 100%	100%	100%	100%	100%	100%	Persemanan
18	Meningkatnya kualitas layanan kepada masyarakat	1	Survei Kepuasan Masyarakat	Jaksurva	Nilai diperoleh dari sistem Jaksurva	88	86	83	85	90	Indeks
19	Meningkatnya penyelesaian indeks lanjut rawan dari temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	1	Persentase progress penyelesaian indeks lanjut eksterenal temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	e-Kinerja	Jumlah verifikasi LHP BPK RI Tahun 2025 dan sebelumnya yang telah diselesaikan oleh Perangkat Daerah dan JAKPO dibawah koordinasinya dibagi jumlah seluruh verifikasi LHP BPK RI yang diterima Tahun 2025 dan sebelumnya dikali 100% (Verifikasi oleh Inspektorat)	26%	25%	25%	25%	100%	Persemanan

Gubernur Daerah Khusus Jakarta,
Jakarta,



Anies Baswedan, Ph.D

Jakarta, 2021
Kepala Dinas Peninggalan Kebudayaan
dan Penyelenggaraan Provinsi DKI Jakarta,



Sa'adi Gunawan
NIP. 197111181991011001



PIAGAM PENGHARGAAN



KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI

Memberikan Penghargaan Kepada:

**PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENANGGULANGAN
KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN PEMPROV DKI JAKARTA**

atas partisipasinya sebagai unit kerja pelayanan berpredikat

WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK)

Jakarta, 21 Desember 2020

Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi

Tjahjo Kumolo

